

BAB III

PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan menyajikan hasil penelitian analisis *framing* pemberitaan Deklarasi SBY-Boediono 15 Mei 2009 di SABUGA Bandung pada Media Indonesia *online* dan Republika *online*. Dalam menganalisis data Peneliti menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman karena elemen yang digunakan cocok untuk membantu peneliti melakukan analisis data pada Media *online*. Periode Pemberitaan dalam penelitian ini, yakni pada periode 15-22 Mei 2009 dengan mengambil 8 buah berita yaitu Media Indonesia *online* 4 berita Republika *online* 4 berita yang berkaitan dengan pemilihan Cawapres Boediono.

Deklarasi SBY-Boediono merupakan acara pengumuman atau pengenalan Capres SBY dan Cawapres Boediono untuk mengikuti pemilihan umum mendatang. SBY merupakan Presiden *incumbent* yang mencalonkan kembali sebagai Capres periode 2009-2014 mendatang. Duet SBY-Boediono cukup menyita perhatian media massa cetak maupun elektronik. Terutama kontroversi yang muncul dengan terpilihnya sosok Boediono sebagai pendamping SBY. Terpilihnya Boediono sebagai Cawapres menimbulkan reaksi publik dan pemberitaan media yang berbeda-beda. Bagi yang keberatan menuding Boediono sebagai sosok neolib yang merusak tatanan perekonomian rakyat dan

bukan berasal dari kalangan politisi. Dari Para profesional dan eksekutif perusahaan-perusahaan di sektor keuangan sangat mendukung Cawapres Boediono dengan berbagai alasan. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pemberitaan Deklarasi SBY-Boediono.

Di dalam pembahasan ini, peneliti akan memaparkan bagaimana Media Indonesia *online* dan Republika *online* mengkonstruksi realitas Deklarasi SBY-Boediono yaitu mengenai Pemilihan Boediono sebagai Cawapres yang mendampingi Capres SBY. Melalui penelitian ini dapat dilihat bagaimana suatu realitas yang sama dikonstruksi secara berbeda-beda oleh kedua media *online* ini. Dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pemberitaan Media Indonesia *online* dan Republika *online*.

A. PENYAJIAN DATA

Data yang disajikan dalam pembahasan ini adalah pemberitaan-pemberitaan Media Indonesia *online* dan Republika *online* mengenai Deklarasi SBY-Boediono. Data yang diambil peneliti dalam penelitian ini adalah Periode 15-22 Mei 2009. Dimana pada tanggal tersebut mulai hangatnya pemberitaan Deklarasi SBY-Boediono sampai setelah Deklarasi SBY-Boediono. Judul Berita tersebut peneliti uraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Berita Media Indonesia *Online* Mengenai Deklarasi SBY-Boediono
Tanggal 15 -22 Mei 2009

Tanggal	Jam	Judul Berita
15 Mei 2009	01.02	PKS Nilai SBY Tidak Tunjukkan Itikad Baik
15 Mei 2009	15.07	Demokrat Lebih Pilih 'Istri' tidak Populer
15 Mei 2009	22.31	Deklarasi SBY Sepelekan Keterwakilan Ummat
16 Mei 2009	19.32	SBY Minta Maaf, PKS dan Demokrat Mesra Kembali
16 Mei 2009	21.34	Kontrak Koalisi PAN Menyusul
16 Mei 2009	21.54	PAN belum Utuh Gabung Ke Demokrat
16 Mei 2009	22.31	Sekjen PAN Bantah Terjadi Perpecahan Karena Dukung SBY-Berboedi
16 Mei 2009	22.28	Demokrat Klaim Ketua DPP PAN telah Tandatangani Berkas Koalisi
16 Mei 2009	22.43	SBY Dituntut Bentuk Kabinet Ahli
22 Mei 2009	22.53	Agenda Ekonomi Pasangan SBY-Boediono Menuai Kecaman

Sumber: Media Indonesia *Online* disusun kembali oleh peneliti

Tabel 3.2
Berita Republika *Online* Mengenai Deklarasi SBY-Boediono
Tanggal 15-22 Mei 2009

Tanggal	Jam	Judul Berita
15 Mei 2009	05.27	Dizikir Salman ITB Sambut deklarasi SBY-Boediono
15 Mei 2009	05.40	FMLDPI Dukung SBY Lanjutkan Pemerintahan
15 Mei 2009	06.03	INACA : Boediono Mampu Bawa Perubahan Ekonomi
15 Mei 2009	13.12	PAN dan PPP Hadiri Deklarasi SBY- Boediono
15 Mei 2009	17.09	PKS : Ini Cuma Masalah Komunikasi
15 Mei 2009	19.15	PPP teken Kontrak Koalisi Dengan PD
15 Mei 2009	19.56	PKS Minta Keterwakilan Ummat, PD Bilang Koalisi Dulu
15 Mei 2009	21.59	PKS Terima Alasan Yudhoyono Gandeng Boediono
15 Mei 2009	21.23	SBY-Boediono Dinilai Tepat dalam Perbaikan Ekonomi
17 Mei 2009	05.27	Kontrak PKS PD Sudah Ditandatangani

Sumber : Republika *Online* yang disusun kembali oleh Peneliti

B. ANALISIS DATA

Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan model Robert N. Entman yang meletakkan dasar-dasar bagi analisis *framing* untuk studi isi media. Konsep *framing* oleh Entman digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. *Framing* dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar dari pada isu yang lain.

Framing merupakan suatu cara pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita. Cara pandangan atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagaimana yang ditonjolkan dan dihilangkan dan hendak dibawa kemana berita tersebut. Penyajian sebuah realitas dalam bentuk berita ternyata menyimpan subjektifitas penulis. Bagi masyarakat biasa, pesan dari sebuah berita akan dinilai apa adanya. Berita akan dipandang sebagai suatu hal yang penuh dengan objektifitas. Namun, berbeda dengan kalangan tertentu yang memahami betul gerak pers. Mereka akan menilai lebih dalam terhadap pemberitaan, yaitu dalam setiap penulisan berita menyimpan ideologi/latar belakang seorang penulis (Eriyanto, 2002:17).

Adapun hasil analisis data dengan menggunakan analisis *framing* Robert N. Entman yang ditulis peneliti dari masing-masing media *online* dapat dilihat sebagai berikut:

1. *Frame Media Indonesia Online: Pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden SBY tidak tepat untuk masa pemerintahan mendatang yang dilihat sisi ekonomi, politik, serta tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.*

Media Indonesia *online* memandang bahwa pemilihan Boediono sebagai Cawapres oleh SBY yang dianggap tidak tepat untuk masa pemerintahan mendatang yang melihat dari sisi ekonomi, politik, serta tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini dilihat dari pemberitaan Media Indonesia *online* cenderung bernada negative dengan pernyataan yang menyudutkan sosok Boediono sebagai antek neoliberal (perekonomian International) yang bertolak belakang dengan sistem perekonomian kerakyatan di Indonesia. Serta pemilihan Boediono yang dianggap tidak mencerminkan persatuan bangsa dan kesetaraan antara partai koalisi serta keterwakilan umat Jawa- non Jawa. Alasan tersebut diperoleh dari sumber informasi dan pernyataan dari para tokoh bangsa, pengamat ekonomi dan politik Indonesia.

Media Indonesia *online* mengeluarkan pemberitaan-pemberitaan dari sisi kontra terhadap pemberitaan Deklarasi SBY-Boediono dengan pencalonan Boediono sebagai Cawapres oleh SBY dalam berbagai aspek. *Headline* pemberitaan Media Indonesia *online* adalah “Agenda

Ekonomi Pasangan SBY-Boediono Menuai Kecaman”. “PKS Nilai SBY Tidak Tunjukkan Itikad Baik”. “SBY Dituntut Bentuk Kabinet Ahli”. SBY Minta Maaf, PKS dan Demokrat Mesra Kembali.

Dalam konstruksi realitas, bahasa merupakan unsur utama dalam pembentukan realitas dalam masyarakat. Bahasa merupakan instrumen pokok untuk menceritakan realitas. Sesuai dengan formulasi oleh Robert N. Entman dengan dua dimensi besar yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas. Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih berarti atau lebih diingat oleh khalayak. Realitas yang disajikan lebih besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas.

Seleksi isu merupakan aspek yang berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam itu, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan. Dari proses ini selalu terkandung di dalamnya ada bagian berita yang dimasukkan (*included*), tetapi ada juga berita yang dikeluarkan. (*Excluded*). Tidak semua aspek Atau bagian dari isu ditampilkan, wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu.

Penonjolan aspek tertentu dari isu merupakan suatu aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa/isu tersebut telah dipilih dan bagaimana aspek tersebut ditulis. Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar dan citra, tertentu untuk ditampilkan khalayak.

Untuk analisis *framing* dengan menggunakan Robert N. Entman yang menggambarkan secara luas bagaimana peristiwa dimaknai dan ditandakan oleh wartawan. Analisis *framing* model Robert N. Etman mempunyai perangkat *framing* yaitu *define problem*, *diagnose cause*, *make moral judgement*, dan *treatment recomondation*. *Define problem* (pendefenisian masalah) adalah elemen pertama kali untuk melihat mengenai *framing*. Elemen ini merupakan master *frame/* bingkai yang paling utama. Ia menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. *Dignose causes*, atau memperkirakan penyebab masalah merupakan elemen *framing* untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. *Make moral judgement* (membuat pilihan moral) adalah elemen *framing* yang dipakai uatuk membenarkan/memberi argumentasi pada pendefenisian masalah yang sudah dibuat. Elemen *framing* lainnya adalah *treatment recommendation* atau menekankan penyelesaian dimana elemen mi dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh karyawan.

Pemberitaan mengenai “**Agenda Ekonomi Pasangan SBY-Boediono Menuai Kecaman**” akan dianalisis dengan menggunakan analsis *framing* Robert N. Entman. Adapun analisis *framingnya* adalah sebagai berikut:

Pemilihan *headline* dengan judul berita “Agenda Perekonomian Pasangan SBY-Boediono Menuai Kecaman” terlihat bahwa Media Indonesia *online* ingin membangun atau membentuk pikiran pembaca

bahwa agenda perekonomian ini tidak tepat dilaksanakan dengan keadaan di negeri kita. Dari *headline* judul berita terlihat bahwa Media Indonesia *online* membangun konstruksi atau wacana bahwa Boediono yang menjadi Cawapres tidak memberikan perubahan ekonomi yang baik untuk Indonesia.

Problem identification. Media Indonesia *online* mengidentifikasi permasalahan dalam pemberitaan agenda perekonomian pasangan SBY-Boediono merupakan masalah agenda lembaga keuangan Internasional atau perekonomian neoliberalisme. Agenda perekonomian SBY-Boediono ini menekankan penerapan perekonomian neoliberal yang merupakan agenda keuangan Internasional yang akan diterapkan di Indonesia. Ada beberapa alasan dikatakan bingkai pemberitaan ini yaitu keuangan internasional yang dianut Boediono merupakan bingkai yang paling dominan dalam pemberitaan. Pertama, semua masalah berkaitan dengan permasalahan agenda ekonomi internasional atau neoliberalisme. Dalam pandangan Media Indonesia *online* menyatakan bahwa pasangan ini merupakan pasangan yang akan mengusung keuangan internasional atau neoliberal. Dalam pemberitaan ini terlihat dengan jelas bahwa adanya kontroversi pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden yang merupakan antek neoliberal atau sosok keuangan yang akan mengusung sistem keuangan internasional atau neoliberalisme. Pada pemberitaan juga ditunjukkan bahwa semua indikasi dari pemilihan Boediono sebagai Cawapres akan terkait dengan agenda keuangan

internasional atau neoliberal. Hal tersebut sesuai dengan isi media sebagai berikut;

Mantan Menteri Bappenas Kwik Kian Gie, pengamat ekonomi Hendri Saporini, dan politisi Dradjad Wibowo mempersoalkan agenda ekonomi yang digalang Capres Susilo Bambang Yudhoyono dan Cawapresnya Boediono. Mereka menduga pemilihan Boediono sebagai cawapres SBY merupakan agenda lembaga keuangan internasional atau lebih dikenal dengan neoliberal.

Kedua, Dengan melihat pemberitaan ini sebagai permasalahan agenda keuangan internasional; sumber berita yang diwawancarai serta pernyataan dari pakar ekonomi di Indonesia dan menentang perekonomian neoliberal yang tidak sesuai dengan perekonomian kerakyataan. Hal ini diungkapkan oleh pengamat ekonomi Hendri yang menyatakan bahwa SBY akan lebih meningkatkan orang-orang yang mempunyai paham neoliberal pada perekonomian Negara kita dengan dipilihnya Boediono sebagai Calon Wakil Presiden.

“Sebelumnya neoliberal sudah masuk dalam tim ekonomi cabinet saat ini. Namun sekarang bakal dicantolkan lebih tinggi dengan ditaruh di posisi wakil presiden,” kata Hendri saat diskusi JK-Wiranto untuk Indonesia adil dan sejahtera: Ekonomi kemandirian versus ekonomi neoliberal di Jakarta, Jumat (22/5).

Pada bagian lain, Media Indonesia *online* juga menuliskan pendapat mantan menteri ekonomi Kwik Kian Gien yang menyatakan bahwa apabila pasangan SBY dan Boediono berkuasa dengan beberapa antek neoliberal maka sumber daya alam di Indonesia tidak mampu untuk dikelola secara efisien, hemat dan kemungkinan sumber daya alam yang ada di Indonesia akan habis. Disini Kwik menunjukkan keberatannya

terhadap terpilihnya Boediono sebagai Cawapres SBY. Hal ini sesuai dengan kutipan di bawah ini:

Menurut Kwik, apabila SBY dan Boediono berkuasa, semua sumber daya alam Indonesia akan habis. Karena itu, dirinya menentang Boediono dan semua agen neoliberal seperti Sri Mulyani, Anggito Abimanyu dan Chatib Basri untuk mengemukakan agenda ekonomi mereka di depan publik. "Jadi biar masyarakat tahu apakah mereka titipan asing atau bukan," ujanya.

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas dapat terlihat bahwa identifikasi permasalahan secara keseluruhan pada pemberitaan ini mengenai permasalahan agenda keuangan internasional atau neoliberal yang merupakan agenda perekonomian pasangan Capres dan Cawapres SBY-Boediono dengan berkaitan pemilihan Boediono sebagai Calon wakil Presiden yang merupakan antek neoliberal. Dengan permasalahan neoliberalisme pada perekonomian Boediono yang ditonjolkan dalam pemberitaan serta pakar-pakar yang diwawancarai mampu menunjukkan dan mengidentifikasi permasalahan dalam pemberitaan ini.

Causal Interpretation. Dalam keseluruhan berita Media Indonesia *online* memosisikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Calon Presiden dan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden merupakan pelaku atau aktor penyebab permasalahan dalam pemberitaan ini. Kedua tokoh ini ditempatkan sebagai penyebab yang mengakibatkan timbulnya berbagai kontroversi terhadap agenda perekonomian untuk periode mendatang.

Letak awal permasalahan pada masalah yang berkaitan dengan agenda perekonomian pasangan SBY-Boediono ini terletak pada pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden yang mendampingi SBY untuk pemilihan umum Capres dan Cawapres pada Juni 2009. Pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden menimbulkan beberapa asumsi dan kontroversi karena Boediono dinilai merupakan antek neoliberal atau sosok yang mendukung sistem keuangan internasional untuk Negara kita, sehingga menimbulkan permasalahan dalam agenda perekonomian yang menuai kecaman dari beberapa pihak yang kontra terhadap agenda perekonomian neoliberal yang diusung.

Pemilihan Boediono sebagai cawapres SBY merupakan agenda lembaga keuangan internasional atau lebih dikenal dengan neoliberal.

Di lain pihak, pendapat Kwik Kian Gie yang menyatakan bahwa Boediono merupakan antek neoliberal. Paham tersebut tidak cocok untuk dilaksanakan dan diterapkan di Negara kita. Hal ini sangat tidak berkaitan dengan paham ekonomi kerakyatan yang selama ini tetap dipertahankan dan diterapkan di Negara kita. Berikut kutipan tentang Boediono yaitu sebagai berikut:

Karena itu, dirinya menentang Boediono dan semua agen neoliberal seperti Sri Mulyani, Anggito Abimanyu dan Chatib Basri untuk mengemukakan agenda ekonomi mereka di depan publik.

Pada bagian lain pengamat ekonomi Hendri juga mengungkapkan pendapatnya tentang Boediono yang mengusung ekonomi neoliberal sehingga dia mempunyai alasan untuk beralih dari pasangan SBY-

Boediono dan mendukung pasangan JK-Wiranto. Hal ini seperti pada kutipan di bawah ini:

Dradjad menilai cukup yakin pasangan Wiranto akan mengusung ekonomi kerakyatan. Menurut dia, dari pidato di Kadin dan diskusi secara pribadi, dirinya melihat agenda ekonomi tidak jauh berbeda dengan buku Amien Rais, *Selamatkan Indonesia*.

Dari sini mulai terlihat bagaimana Boediono yang merupakan sosok Calon Wakil Presiden mendapat kontroversi atau penolakan sehingga menimbulkan permasalahan terhadap agenda perekonomian pada pasangan tersebut untuk diusung pada pemilihan umum mendatang. Dalam pemberitaan ini juga dikembangkan dengan kebijakan SBY untuk lebih meningkatkan orang-orang yang mempunyai paham neoliberal dan memberikan gambaran bahwa pemerintahan pasangan SBY-Boediono ini akan menerapkan perekonomian neoliberal. Hal ini sesuai dengan kutipan di bawah ini:

Sebelumnya neoliberal sudah masuk dalam tim ekonomi kabinet saat ini. Namun sekarang bakal dicantolkan lebih tinggi dengan ditaruh di posisi wakil presiden.

Selain itu, Media Indonesia *online* juga mengulas beberapa kutipan dialog yang diberikan SBY sebagai salah satu pernyataan yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa dirinya mengusung agenda keuangan International atau paham neoliberalisme dari pernyataan SBY dianggap tidak mengutamakan kepentingan dalam Negri, Adapun isi pemberitaan tersebut adalah sebagai berikut:

Hendri mencontohkan ketika capres SBY dan capres JK menyampaikan agenda ekonomi di depan sejumlah pengusaha

yang tergabung dalam Kadin. Dalam dialog itu, Yudhoyono mengatakan akan mengelola sumber daya alam menuju efisiensi. Berbeda dengan Yudhoyono, Jusuf Kalla mengatakan akan melakukan renegotiasi kontrak untuk kepentingan dalam negeri. Perbedaan sangat mencolok. Di saat kita sedang kesulitan mendapatkan gas, tapi Yudhoyono malah melakukan efisiensi. Efisiensi untuk siapa," ungkapnya.

Dari kutipan tersebut sangat jelas terlihat bahwa Capres SBY secara langsung menyetujui dengan paham neoliberalisme yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, Hal ini berbeda dengan pernyataan Capres JK yang menyatakan bahwa pengelolaan, sumber daya alam untuk kepentingan negeri dan tidak ada campur tangan asing yang merupakan sebuah pernyataan dengan mengarah kepada sistem perekonomian kerakyatan. Adanya perbedaan mencolok terhadap pendapat kedua Calon Presiden tersebut menambah asumsi masyarakat dan pakar-pakar ekonomi bahwa Calon Presiden SBY akan mengusung sistem perekonomian neoliberal dengan memilih Boediono. Dalam dialog tersebut Media Indonesia *online* juga menyiratkan pesan bahwa adanya persaingan ideology antara perekonomian neoliberal dengan perekonomian kerakyatan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa *causal interpretation* dalam pemberitaan ini yaitu SBY-Boediono mengusung perekonomian International apabila terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia mendatang. Alasan itu Diperkuat dengan pemilihan Boediono sebagai sosok yang menganut paham neoliberalisme

yang bertolak belakang dengan perekonomian kerakyatan yang ada di Indonesia

Moral evaluation. Aspek ini merupakan salah satu analisis *framing* yang bertujuan untuk melakukan penilaian atas penyebab masalah. Penilaian atas Boediono dan SBY sebagai sumber permasalahan terhadap agenda perekonomian ini dikarenakan beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. *Pertama*, munculnya tuduhan bahwa Boediono merupakan salah satu sosok antek neoliberal. Walaupun secara detail tidak diulas dalam pemberitaan ini mengenai paham Boediono yang menganut paham neoliberalisme, akan tetapi kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin telah dikeluarkan sebelum menjadi Calon Wakil Presiden dan ketika menjadi Gubernur Bank Indonesia yang menyebabkan penilaian tentang Boediono sebagai sosok yang mempunyai paham neoliberalisme.

Kedua. Kebijakan yang dikeluarkan SBY semasa pemerintahannya dan alasan pemilihan SBY terhadap Boediono sebagai Calon Wakil Presiden. Kebijakan SBY dengan memilih menteri ekonomi Sri Mulyani sebagai menteri keuangan menunjukkan bahwa SBY menyetujui pemahaman perekonomian neoliberalisme dan ini akan lebih ditinggikan dengan memilih Boediono sebagai Calon Wakil Presiden. Dalam pemberitaan ini terlihat bahwa SBY sudah mulai memasukkan antek neoliberal pada kabinet pemerintahan sebelumnya dan akan

didukung dengan pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden untuk periode mendatang.

Ketiga. Penilaian tentang penyebab masalah juga berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh SBY baik itu lewat pidato maupun dialog dalam pemilihan umum Calon Presiden. Dalam dialog tersebut SBY mengeluarkan sebuah pernyataan yang dianggap oleh sebagian besar pakar ekonomi bahwa SBY akan mengukung perekonomian International atau neoliberal pada pemerintahannya yang mendatang. Hal ini sangat berbeda dengan pernyataan Jusuf Kalla tentang pengelolaan sumber daya alam yang akan tetap berbasis pada ekonomi kerakyatan. Media Indonesia *online* mengungkapkan perbedaan pernyataan ini yang sangat mencolok sehingga pemahaman tentang keuangan internasional dan neoliberalisme sangat terlihat jelas pada agenda perekonomian yang diusung oleh masing-masing Capres dan Cawapres. Secara tersirat dalam pemberitaan ini menunjukkan bahwa pasangan SBY-Boediono mengukung system perekonomian International atau neoliberalisme sedangkan pasangan JK-Wiranto akan mengukung sistem perekonomian kerakyatan.

Treatment Recommendation. Menjastifikasi atau menawarkan suatu cara dalam menanggulangi masalah serta memprediksi hasil dari suatu permasalahan. Agenda perekonomian pasangan SBY-Boediono menuai kecaman dengan penyebab permasalahan yaitu Boediono sebagai antek neoliberal dan paham yang sama dengan SBY. Atas semua permasalahan



tersebut, maka Media Indonesia *online* merekomendasikan bahwa perekonomian neoliberal tidak sesuai dengan perekonomian kerakyatan kita dan hanya menambah ketergantungan terhadap utang luar negeri. Berikut ini dikutip tentang rekomendasi penyelesaian permasalahan yaitu sebagai berikut:

Penerapan paham neoliberal telah membentuk Indonesia telah masuk siklus ketergantungan terhadap utang luar negeri

Kutipan di atas ditulis pada akhir pemberitaan Media Indonesia *online* dengan harapan sebagai rekomendasi untuk mampu mengkaji ulang atau merevisi sistem perekonomian yang akan diusung oleh pasangan SBY-Boediono sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden untuk periode mendatang. Rekomendasi dari pemberitaan ini yaitu mengubah agenda perekonomian yang tidak sesuai dan tetap menerapkan agenda perekonomian kerakyatan untuk Negara kita tentunya dengan mengganti Boediono sebagai Cawapres SBY.

Adapun ringkasan hasil analisis *framing* dengan menggunakan analisis Robert N. Entman dalam judul pemberitaan “Agenda Perekonomian Pasangan SBY-Boediono Menuai Kecaman” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Ringkasan Analisis *Framing* Robert N. Entman untuk
Pemberitaan Agenda Perekonomian Pasangan SBY-Boediono
Menuai Kecaman

Elemen	Media Indonesia <i>Online</i>
<i>Frame</i> Pemilihan Boediono sebagai Cawapres SBY merupakan penganut	

perekonomian Internasional	
<i>Problem Identification</i>	Perekonomian neoliberal yang akan diusung SBY-Boediono tidak tepat dengan pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden yang merupakan antek neoliberal
<i>Causal Interpretation</i>	Penekanan pada aspek ekonomi kerakyatan di Indonesia yang bertolak belakang dengan aspek perekonomian Internasional dengan aktor permasalahan dalam pemberitaan ini adalah Boediono sebagai antek neoliberal
<i>Moral Evaluation</i>	Agenda perekonomian neoliberal yang tidak sama dengan prinsip ekonomi kerakyatan di Indonesia dan pemilihan Boediono sebagai Cawapres yang merupakan salah satu antek neoliberal serta pernyataan-pernyataan SBY yang menimbulkan kontroversi terhadap pemahamannya atas perekonomian neoliberal
<i>Treatment Recommendation</i>	Perbaiki agenda perekonomian yang diusung oleh SBY-Boediono dengan mempertimbangkan untuk mengusung sistem perekonomian neoliberal dan tetap menerapkan perekonomian kerakyatan untuk Negara Indonesia.

Sumber: Analisis Peneliti dari Media Indonesia *Online*

Untuk memperkuat konstruksi yang telah dibangun oleh Media Indonesia *online* pada berita sebelumnya, Media Indonesia *online* juga menulis berita yang dimuat tanggal 15 Mei 2009 dengan judul “**PKS Nilai SBY tidak Tunjukkan Itikad Baik**”. Penulisan berita ini menunjukkan keseriusan Media Indonesia *online* dalam membangun pemaknaan bahwa Boediono merupakan sosok Wakil Presiden yang tidak cocok untuk pemerintahan yang mendatang dengan berbagai kontroversi dari partai-partai koalisi partai Demokrat. Pemberitaan mengenai “**PKS Nilai SBY Tidak Tunjukkan Itikad Baik**” akan dianalisis dengan menggunakan analisis *framing* Robert N. Entman. Adapun analisis *framing*nya adalah sebagai berikut:

Media Indonesia *online* mengangkat dan memilih isu ini menjadi berita utama dikarenakan berkaitan dengan pemilihan Calon Wakil Presiden SBY yang akhirnya memilih Boediono. Pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden mendapat banyak tantangan dan kontroversi sehingga Media Indonesia *online* mengangkat isu tersebut ke dalam pemberitaan. Hal ini juga berkaitan dengan Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan salah satu partai koalisi Demokrat yang mendukung SBY sebagai Calon Presiden yang tidak diikutsertakan dalam pemilihan tersebut. Pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden mendapat tanggapan yang kurang baik dari PKS dikarenakan tidak mencerminkan kesolidan dan keterwakilan umat. Selain itu, PKS menganggap bahwa kedudukan Calon Wakil Presiden tidak cocok untuk orang professional seperti Boediono melainkan orang-orang dari partai politik.

Pemilihan *headline* dengan judul berita “**PKS Nilai SBY Tidak Tunjukkan Itikad Baik**”, terlihat bahwa Media Indonesia *online* ingin membangun atau membentuk pikiran pembaca bahwa SBY tidak memberikan keputusan yang baik tentang pemilihan Calon Wakil Presiden dan tidak mempunyai itikad yang baik pada partai-partai koalisi yang notabane merupakan partai dengan suara terbesar dalam pemilihan umum sebelumnya. Dari *headline* judul berita terlihat bahwa Media Indonesia *online* memberitakan sikap dan tindakan SBY dalam memilih Boediono sebagai Cawapres untuk dijadikan sebagai pemberitaan yang

mampu menarik perhatian masyarakat serta kontroversi koalisi partai politik yang mendukung SBY sebagai Calon Presiden.

Problem identification. Media Indonesia *online* mengidentifikasi permasalahan dalam pemberitaan penilaian PKS terhadap itikad yang tidak baik oleh SBY merupakan suatu permasalahan yang berada dalam ranah lingkungan politik. Penilaian PKS terhadap tindakan SBY ini menekankan pada pemilihan Calon Wakil Presiden Boediono yang merupakan salah satu lingkup politik yang harus dilakukan secara perundingan bersama-sama dengan koalisi partai-partai. Ada beberapa alasan kenapa dikatakan bingkai pemberitaan ini merupakan bingkai pemberitaan politik termasuk tindakan-tindakan politik SBY terhadap PKS. *Pertama*, semua masalah berkaitan dengan area politik yaitu pemilihan Calon Wakil Presiden dengan perundingan bersama partai-partai koalisi. Dalam pandangan Media Indonesia *online* menyatakan bahwa PKS menilai SBY tidak mempunyai itikad baik untuk berkoalisi dalam pemilihan Calon Wakil Presiden. Penempatan Calon Wakil Presiden merupakan jabatan politik dan bukan jabatan profesional yang diungkapkan oleh ketua PKS. Hal ini sesuai dengan kutipan di bawah ini:

Jabatan cawapres itu adalah jabatan politik bukan profesional. Boediono cocok di bank sentral, sayang kalau jadi cawapres. Boediono tidak mewakili perwakilan ummat.

Dari kutipan tersebut terlihat bahwa Media Indonesia *online* membingkai pemberitaan ini dengan pemberitaan politik secara dominan. Media Indonesia *online* menulis dengan jelas bahwa PKS tidak menerima

Calon Wakil Presiden yang berasal dari kalangan professional, karena tidak sesuai dengan jabatan Calon Wakil Presiden yang merupakan jabatan politik.

Kedua, sebagai konsekuensi dari melihat pemberitaan ini sebagai permasalahan politik antara PKS dengan SBY dalam permasalahan pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Media Indonesia *online* terhadap orang politik yaitu ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua PKS mengungkapkan secara jelas dan rinci bahwa Boediono tidak mampu mewakili ummat dan SBY-Boediono merupakan tokoh nasionalis sehingga tidak adanya keterwakilan ummat. Hal ini sesuai dengan kutipan di bawah ini:

“Kita perlu rasionalitas alasan sebagai pertanggungjawaban terhadap ummat kenapa perlu mendukung pasangan ini. Apalagi, kedua-duanya dikategorikan nasionalis”, jelasnya.

Pada bagian lain, Media Indonesia *online* juga menuliskan hasil wawancara dengan Tiffatul yang menyatakan bahwa pihak PKS memberikan tiga pilihan dalam memilih Calon Wakil Presiden. Surat yang diberikan merupakan nama-nama yang dicalonkan PKS sebagai Calon Wakil Presiden untuk mendampingi SBY pada masa pemerintahan mendatang, dan walaupun ditolak dengan jelas PKS menyarankan tetap memilih Calon Presiden dalam lingkup politik yaitu dengan partai-partai koalisi. Hal tersebut sesuai dengan hasil kutipan di bawah ini:

“Tiffatul membeberkan sebenarnya PKS memberikan tiga buah pilihan bagi SBY, yang ia sebut sebagai kaul. Kaul tertinggi

adalah SBY memilih tiga nama dalam amplop yang diserahkan oleh Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin beberapa waktu lalu. Kalau ditolak, SBY sebaiknya memilih calon dari salah satu partai koalisi. Pilihan terakhir adalah SBY sebaiknya memilih professional yang mewakili ummat”.

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas dapat terlihat bahwa identifikasi permasalahan secara keseluruhan pada pemberitaan ini mengenai permasalahan politik antara PKS dengan SBY yang menilai sikap SBY tidak menunjukkan itikad yang baik untuk berkoalisi dengan memilih Boediono sebagai Calon Wakil Presiden secara sepihak. Dengan melihat permasalahan politik dalam pemberitaan ini yaitu pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden yang dilakukan secara sepihak serta pakar politik yang diwawancarai mampu menunjukkan dan mengidentifikasi permasalahan dalam pemberitaan ini.

Causal Interpretation. Dalam keseluruhan berita Media Indonesia *online* memposisikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Calon Presiden dan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden merupakan pelaku atau aktor penyebab permasalahan dalam pemberitaan ini. Kedua tokoh ini ditempatkan sebagai penyebab yang mengakibatkan timbulnya berbagai kontroversi terhadap pasangan Capres dan Cawapres yang akan didukung dan diajak berkoalisi dengan PKS.

Letak awal permasalahan pada masalah yang berkaitan dengan penilaian PKS terhadap tindakan SBY ini, terletak pada pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden yang mendampingi SBY untuk pemilihan umum Capres dan Cawapres pada Juni 2009 tanpa melakukan

perundingan bersama dengan PKS. Pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden menimbulkan beberapa kontroversi karena Boediono dinilai merupakan sosok profesional dan bukan merupakan orang politik sehingga tidak cocok dengan jabatan cawapres ini. Hal tersebut sesuai dengan kutipan di bawah ini:

Jabatan cawapres itu adalah jabatan politik bukan profesional. Boediono cocok di bank sentral, sayang kalau jadi cawapres, Boediono tidak mewakili perwakilan ummat," cetusnya. (DM/OL-06)

Di lain pihak, Media Indonesia *online* juga menulis bahwa Boediono tidak memberikan keterwakilan ummat. SBY dan Boediono merupakan sosok nasionalitas, sehingga Tiffatul memberikan alasan bahwa Capres dan Cawapres harus mampu mewujudkan keterwakilan ummat, dengan memilih Calon Wakil Presiden berasal dari tokoh partai politik Islam.

Kita perlu rasionalitas alasan sebagai pertanggungjawaban terhadap ummat kenapa perlu mendukung pasangan ini. Apalagi, kedua-duanya dikategorikan nasionalis," jelasnya.

Selain mempermasalahkan pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden, juga mempermasalahkan pemilihan Boediono yang dilakukan SBY tanpa melakukan perundingan dan diputuskan secara sepihak. Menurutnya tindakan tersebut menunjukkan bahwa SBY tidak mempunyai itikad yang baik dalam berkoalisi. Hal tersebut sesuai dengan kutipan di bawah ini:

Kita bukan mempermasalahkan Boediono-nya, tapi SBY awalnya berjanji mau ajak kami bicara sebelumnya, kata Presiden PKS Tiffatul Sembiring di Jakarta, Rabu (13/5). Tiffatul menuturkan,

SBY hanya mengirimkan pesan pendek Senin (11/5) kepada dirinya yang memberitahukan bahwa SBY telah memilih Boediono

Dari sini mulai terlihat bagaimana Boediono yang merupakan sosok Calon Wakil Presiden mendapat kontroversi atau penolakan dari PKS dengan alasan bahwa sosok Boediono bukan merupakan orang politik dan tidak mampu mewakili ummat. Dalam pemberitaan ini juga dikembangkan dengan sikap dan tindakan SBY yang memilih Boediono tanpa konfirmasi atau perundingan sebelumnya bersama PKS yang mengindikasikan sikap SBY tidak mempunyai itikad yang baik untuk berkoalisi.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa *causal interpretation* dalam pemberitaan ini yaitu Boediono dan SBY, Boediono sebagai Calon Wakil Presiden yang tidak mewakili ummat dan bukan merupakan orang politik serta SBY yang melakukan tindakan dalam memilih Boediono sebagai Calon Wakil Presiden secara sepihak.

Moral evaluation. Aspek ini merupakan salah satu analisis *framing* yang bertujuan untuk melakukan penilaian atas penyebab masalah. Penilaian atas tindakan SBY dalam memilih Calon Wakil Presiden yang dilakukan secara sepihak merupakan sumber permasalahan. *Pertama*, tindakan SBY dalam memilih Calon Wakil Presiden sebagai Boediono mendapat penolakan PKS. Hal ini dikarenakan berbagai alasan yang diungkapkan ketua PKS bahwa Boediono merupakan sosok profesional dan sangat disayangkan jika

menjabat sebagai Calon Wakil Presiden. Selain itu, alasan lain dinyatakan oleh PKS bahwa pemilihan Boediono sebagai Cawapres tidak menunjukkan kesatuan umat sehingga PKS tidak mampu memberikan alasan rasionalitas untuk mendukung pasangan ini sebagai Capres dan Cawapres dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Indonesia.

Kedua. PKS tidak menerima tindakan dan sikap SBY dalam memilih Boediono Cawapres tanpa melakukan perundingan. Hal tersebut diindikasikan oleh PKS bahwa SBY tidak mempunyai itikad yang baik untuk berkoalisi. PKS menilai bahwa SBY harus mempunyai Calon Wakil Presiden yang berasal dari koalisi partai politik. Tindakan SBY dalam memilih Cawapres menunjukkan bahwa surat yang diberikan serta permohonan PKS untuk menunjuk Cawapres dari partai-partai berkoalisi tidak dihiraukan. Hal ini menjadikan PKS berpikir bahwa SBY tidak berminat untuk berkoalisi dengan PKS. Selain itu, PKS juga mempunyai beberapa alasan yang rasional dalam mencalonkan Cawapres untuk mendampingi SBY dalam pemilu pada Juni.

Treatment Recommendation. Menjastifikasi atau menawarkan suatu cara dalam menanggulangi masalah serta memprediksi hasil dari suatu permasalahan. PKS menilai SBY tidak mempunyai itikad yang baik dengan penyebab permasalahan SBY memilih Boediono sebagai Cawapres yang mendampinginya pada pemilu mendatang diputuskan secara sepihak tanpa melakukan perundingan bersama dengan partai-

partai koalisi yang mendukung SBY sebagai Calon Presiden. Atas semua permasalahan tersebut, maka Media Indonesia *online* merekomendasikan untuk memilih Calon Wakil Presiden yang berasal dari partai politik. Media Indonesia *online* menulis pada akhir pemberitaan sebagai salah satu pemecahan permasalahan yang ditulis sebagai berikut:

Jabatan cawapres itu adalah jabatan politik bukan profesional. Boediono cocok di bank sentral, sayang kalau jadi cawapres. Boediono tidak mewakili perwakilan ummat.

Kutipan di atas ditulis pada akhir pemberitaan oleh Media Indonesia *online* dengan harapan sebagai rekomendasi untuk mampu mengkaji ulang atau merevisi pencalonan Calon Wakil Presiden yang mampu memberikan perbaikan dan pemerintahan yang bersih serta baik untuk Indonesia. Rekomendasi dari pemberitaan ini yaitu memilih Calon Wakil Presiden dari kalangan politik yang berasal dari koalisi parta-partai dan bukan dari kalangan profesionalitas.

Adapun ringkasan hasil analisis framing dengan menggunakan analisis Robert N. Entman dalam judul pemberitaan “PKS Nilai SBY Tidak Tunjukkan Itikad Baik” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Ringkasan Analisis *Framing* Robert N. Entman untuk PKS
Nilai SBY Tidak Tunjukkan Itikad Baik

Elemen	Media Indonesia <i>Online</i>
	<p style="text-align: center;"><i>Frame</i></p> <p>Pemilihan Boediono secara sepihak tidak disetujui oleh Partai Koalisi yaitu PKS, Pemilihan Boediono sebagai Cawapres tidak menunjukkan keterwakilan ummat</p>
<p><i>Problem Identification</i></p>	<p>Pemilihan Boediono oleh SBY sebagai Calon Wakil Presiden tanpa melakukan perundingan bersama yang mengindikasikan itikad tidak baik dalam koalisi PKS</p>

	dengan SBY
<i>Causal Interpretation</i>	Penekanan pada pemilihan Cawapres Boediono yang dilakukan sepihak dengan penolakan PKS yang menyatakan bahwa Boediono tidak cocok dalam jabatan Cawapres serta tidak menunjukkan keterwakilan umat
<i>Moral Evaluation</i>	Pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden tanpa melakukan perundingan bersama dan tidak adanya keterwakilan umat pada pasangan tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung pasangan tersebut sebagai pasangan Capres dan Cawapres
<i>Treatment Recommendation</i>	Rekomendasi permasalahan ini yaitu pemilihan Calon Wakil Presiden yang mendampingi SBY merupakan sosok yang berasal dari lingkungan politik dan bukan lingkungan profesional serta harapan Cawapres dari koalisi partai yang mendukung SBY sebagai Calon Wakil Presiden

Sumber: Analisis Peneliti dari Media Indonesia *Online*

Dalam penelitian ini diangkat sebuah berita pada tanggal 15 Mei 2009 yang berjudul “**SBY Dituntut Bentuk Kabinet Ahli**” untuk memperkuat *framing* Media Indonesia *online*. Adapun analisis *framingnya* adalah sebagai berikut:

Pemilihan *headline* dengan judul berita “**SBY Dituntut Bentuk Kabinet Ahli**” terlihat bahwa Media Indonesia *online* ingin membangun atau membentuk pikiran pembaca bahwa pemilihan Boediono menuntut SBY untuk membentuk suatu kabinet yang mampu memperbaiki kondisi pemerintahan untuk periode mendatang. Dari *headline* judul di atas terlihat bahwa kesuksesan pemerintahan mendatang bukan hanya sampai pada kepresidenan tetapi harus berkaitan erat dengan membentuk kabinet ahli yang berasal dari orang-orang profesional.

Problem Identification. Media Indonesia *online* mengidentifikasi dua permasalahan dalam pemberitaan ini. *Pertama*, Media Indonesia *online* mendefenisikan permasalahan deklarasi SBY yang menetapkan Calon Wakil Presiden Boediono tidak memberikan jalan mulus kepada SBY untuk dapat diterima oleh pemilih. Dalam pemberitaan ini. Media Indonesia *online* ingin membentuk bahwa Boediono bukan merupakan orang politik dan tidak terkenal dikalangan pemilih sehingga tidak mendapatkan dukungan politik dari pemilih. Hal ini sesuai dengan kutipan di bawah ini.

Memilih Boediono tidak berarti bisa memuluskan langkah SBY untuk diterima pemilih. Tidak ada jaminan bahwa orang yang *qualifield* secara teknokratik memperoleh dukungan politik dari pemilih. Sebab, logika teknokratik dan politik itu berbeda

Selain itu. Media Indonesia *online* juga menuliskan pendapat yang berkaitan dengan pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden yang merupakan orang professional dapat memperkuat sistem presidensial, melainkan terdapat kelemahan yang berkaitan dengan pemilihan Boediono sebagai Cawapres SBY. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara di bawah ini:

Pakar politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Pratikno, Sabtu (16/5), mengungkapkan, akan menjadi percuma jika SBY terpilih lagi menjadi presiden namun tidak membentuk kabinet dengan merangkul kalangan profesional untuk memperkuat eksekutif. Pasalnya, kabinet masih berpotensi terbelah. "Di satu sisi mencari cawapres dari kalangan profesional memperkuat sistem presidensial. Tetapi di sisi lain kabinetnya masih bisa terbelah. Presidensialisme tidak berhenti pada kantor kepresidenan saja tetapi harus dilihat dari konteks kabinetnya," katanya.

Permasalahan yang *kedua* ditulis oleh Media Indonesia *online* berkaitan dengan pembentukan kabinet ahli untuk pemerintahan mendatang. Media Indonesia *online* menuliskan bahwa kabinet ahli dapat dibentuk dengan memilih orang-orang profesional dalam kabinet. Untuk memperkuat sistem presidensial yang kuat dan kokoh maka diperlukan suatu kabinet ahli dalam pemerintahan mendatang. Hal ini sesuai dengan kutipan di bawah ini:

Komitmen Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono sebagai calon presiden (*capres*) dan calon wakil presiden (*cawapres*) yang akan membangun sistem presidensial kuat dan kokoh masih diragukan. Sebab, komitmen itu harus diiringi keberanian membentuk kabinet ahli, atau *zaken* kabinet.

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa identifikasi permasalahan yaitu pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden menuntut SBY untuk membentuk kabinet ahli dari kalangan profesional dan memperkuat sistem presidensial yang tidak memecah belah kabinet dengan dukungan politik penuh kepada kedua pasangan tersebut.

Causal Interpretation. Dalam keseluruhan berita Media Indonesia *online* memosisikan SBY sebagai Calon Presiden dan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden merupakan pelaku atau aktor penyebab permasalahan dalam pemberitaan ini. Kedua tokoh ini ditempatkan sebagai sumber permasalahan dalam penyelenggaraan Deklarasi SBY-Boediono.

Letak awal permasalahan pada isu ini yaitu berkaitan dengan penetapan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden yang mendampingi

SBY. Pemilihan Boediono ini memberikan jalan yang tidak mulus kepada SBY untuk menjadi calon presiden untuk masa pemerintahan mendatang karena Boediono berasal dari profesional teknokratik. Hal ini sesuai dengan kutipan di bawah ini:

Memilih Boediono tidak berarti bisa memuluskan langkah SBY untuk diterima pemilih. Tidak ada jaminan bahwa orang yang *qualifield* secara teknokratik memperoleh dukungan politik dari pemilih. Sebab, logika teknokratik dan politik itu berbeda.

Selain itu, permasalahan dalam pemberitaan ini ditulis oleh Media Indonesia *online* dengan menjadikan Boediono sebagai aktor dalam permasalahan ini. Media Indonesia *online* menuliskan bahwa figur Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tergantung pada perspsi pemilih. Adanya perbedaan persepsi antara kalangan professional dan politis menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi untuk jabatan Wakil Presiden. Hal ini sesuai dengan kutipan di bawah ini.

Penerimaan figur dan kesuksesan pasangan capres dan cawapres tergantung dari perspektif pemilih. Apakah pemilih menerima profesionalitas teknokratik atau masih memperhitungkan kedekatan dan solidaritas politik. Politik itu lebih banyak dilihat dari *solidarity maker*, bukan sebagai teknokrat" jelasnya.

Moral evaluation. Penilaian atas Boediono sebagai sumber permasalahan dalam pemberitaan ini mencakup beberapa alasan. *Pertama*, SBY memilih Boediono sebagai Calon Wakil Presiden yang berasal dari professional sehingga tidak memberikan jalan mulus kepada SBY untuk menjadi Calon Presiden mendatang. *Kedua*, Pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden bukan berasal dari kalangan

politik sehingga akan memecah dukungan politik untuk pasangan SBY dan Boediono. *Ketiga*, Pemilihan Boediono yang merupakan sosok teknokrat berbeda dengan sosok politisi sehingga menimbulkan permasalahan terhadap dukungan untuk pemilih.

Treatment Recommendation. Media Indonesia online dalam tulisannya menjustifikasi suatu permasalahan ini yaitu dengan memberikan solusi bahwa sistem pemerintahan presidensil yang kuat dan kokoh harus diwujudkan dengan sistem kabinet ahli. Penyelesaian permasalahan tersirat dalam kutipan ini sesuai dengan isi media di bawah ini.

Pakar politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Pratikno, Sabtu (16/5), mengungkapkan, akan menjadi percuma jika SBY terpilih lagi menjadi presiden namun tidak membentuk kabinet dengan merangkul kalangan profesional untuk memperkokoh eksekutif.

Dari kutipan di atas tersirat suatu pemecahan permasalahan bahwa SBY dituntut membentuk kabinet ahli dari kalangan profesional untuk membentuk sistem pemerintahan yang kuat dan bagus. Adapun ringkasan hasil analisis *framing* dengan menggunakan analisis Robert. N. Entman dalam judul pemberitaan “**SBY Dituntut Bentuk Kabinet Ahli**” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Ringkasan Analisis *Framing* Robert N. Entman untuk SBY Dituntut Bentuk Kabinet Ahli

Elemen	Media Indonesia Online
	<p style="text-align: center;"><i>Frame</i></p> <p>Pemilihan Boediono sebagai Cawapres SBY tidak memperkokoh sistem presidensil dengan potensi memecah belah kabinet</p>

<i>Identification</i>	Pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden dari kalangan teknokrat akan memecah pendukung dan pemilih SBY dan berpotensi untuk memecah belah kabinet ahli
<i>Causal Interpretation</i>	Penekanan pada pemilihan Cawapres Boediono merupakan teknokrat dapat memberikan jalan yang tidak mulus untuk SBY untuk menjadi Calon Presiden. Karena teknokratik dan politik berbeda.
<i>Moral Evaluation</i>	Pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden menunjukkan terpecahnya kekuatan politik SBY dan mampu berpotensi dalam memecah kabinet.
<i>Treatment Recommendation</i>	Rekomendasi permasalahan ini yaitu membentuk suatu kabinet ahli untuk memperkuat sistem presidensial pemerintahan mendatang.

Sumber: Analisis Peneliti dari Media Indonesia *Online*

Selain berita di atas, Media Indonesia *online* juga menuliskan berita dengan judul **“SBY Minta Maaf, PKS dan Demokrat Mesra Kembali”**. Media Indonesia *online* menempatkan posisinya sebagai salah satu media yang menulis bahwa Boediono tidak tepat sebagai Calon Wakil Presiden SBY untuk masa pemerintahan mendatang.

Pemilihan *headline* dengan judul berita **“SBY Minta Maaf, PKS dan Demokrat Mesra Kembali”** terlihat bahwa Media Indonesia *online* ingin membangun atau membentuk pikiran pembaca bahwa SBY melakukan kesalahan yang membuat PKS tidak senang sehingga SBY meminta maaf kepada pihak PKS.

Problem Identification. Media Indonesia *online* mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan interupsi PKS atas terpilihnya Boediono sebagai Calon Wakil Presiden SBY. PKS tidak menerima pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden karena tidak ada alasan yang rasionalis untuk mendukung Boediono sebagai Calon Wakil Presiden.

Dengan pemilihan Boediono tidak menunjukkan terciptanya pasangan yang Nasionalis-Islamis seperti yang diharapkan partai koalisi Demokrat Hal ini sesuai dengan kutipan di bawah ini:

Menurutnya, PKS perlu rasionalitas yang dapat menjelaskan kepada umat alasan perlu mendukung pasangan SBY Berbudi. Apalagi, pasangan tersebut dinilai tidak mencitrakan kombinasi Nasionalis-Islamis yang diinginkan oleh PKS.

Selain itu, Media Indonesia *online* juga menuliskan alasan PKS untuk tidak menyetujui Boediono sebagai Calon Wakil Presiden dengan alasan mempertahankan prinsip kesetaraan dalam koalisi. Dipilihnya Boediono sebagai Cawapres menunjukkan bahwa tidak adanya kesetaraan koalisi dengan partai koalisi karena Boediono bukan berasal dari partai. Hal ini sesuai dengan kutipan di bawah ini:

Komplain PKS ibarat interupsi keluarga besar untuk pertahankan prinsip kesetaraan dalam koalisi.

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa identifikasi permasalahan yaitu pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden tidak disetujui oleh partai koalisi SBY yaitu PKS. Ketidaksetujuan PKS terhadap Boediono sebagai Cawapres berkaitan dengan prinsip kesetaraan koalisi dan dukungan politik pasangan SBY dan Boediono.

Causal Interpretation. Dalam keseluruhan berita Media Indonesia *online* memposisikan SBY sebagai Calon Presiden dan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden merupakan pelaku atau aktor penyebab permasalahan dalam pemberitaan ini. Kedua tokoh ini ditempatkan

sebagai sumber permasalahan dalam penyelenggaraan Deklarasi SBY-Boediono.

Letak awal permasalahan pada isu ini yaitu berkaitan dengan penetapan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden yang mendampingi SBY. Pemilihan Boediono ini menimbulkan berbagai isu dan kontroversi sehingga menghilangkan kepercayaan PKS untuk berkoalisi dengan SBY. Hal ini sesuai dengan kutipan di bawah ini

Boediono, menurutnya, telah menjawab semua isu yang berkembang di masyarakat, misalnya tentang antek neoliberalis dan penganut kejawen. PKS tidak akan memberikan rekomendasi apapun, melainkan mendorong Boediono untuk menunjukkannya dengan tindakan nyata

Selain itu, permasalahan dalam pemberitaan ini ditulis oleh Media Indonesia *online* dengan menjadikan Boediono sebagai aktor dalam permasalahan ini. Media Indonesia *online* menuliskan bahwa figur pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden tidak menunjukkan prinsip kesetaraan pada koalisi. Hal ini sesuai dengan kutipan di bawah ini.

Komplain PKS ibarat interupsi keluarga besar untuk pertahankan prinsip kesetaraan dalam koalisi.

Moral evaluation. Penilaian atas Boediono sebagai sumber permasalahan dalam pemberitaan ini mencakup beberapa alasan. *Pertama*, Pemilihan Boediono tidak menunjukkan prinsip kesetaraan koalisi karena Boediono bukan merupakan orang politik dari partai-partai koalisi. *Kedua*, Pemilihan Boediono harus didukung dengan alasan yang rasional berkaitan dengan Boediono merupakan antek neoliberal dan

islam kejawan sehingga tidak adanya alasan rasionalitas untuk mendukung Boediono sebagai Calon Wakil Presiden.

Treatment Recommendation. Media Indonesia *online* dalam tulisannya menjustifikasi suatu permasalahan ini yaitu pembicaraan antara pihak PKS dengan Partai Demokrat tentang Boediono. Keikutsertaan partai koalisi pada diskusi pemilihan Boediono sebagai Calon wakil Presiden tidak menimbulkan ketegangan antara PKS dan SBY.

Adapun ringkasan hasil analisis *framing* dengan menggunakan analisis Robert N. Entman dalam judul pemberitaan “SBY Minta Maaf, PKS dan Demokrat Mesra Kembali” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Ringkasan Analisis *Framing* Robert N. Entman untuk SBY Minta Maaf, PKS dan Demokrat Mesra Kembali

Elemen	Media Indonesia <i>Online</i>
	<i>Frame</i> Pemilihan Boediono tidak menunjukkan kesetaraan koalisi dengan partai PKS
<i>Identification</i>	Pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden tidak menunjukkan kesetaraan pada koalisi sehingga PKS tidak senang
<i>Causal Interpretation</i>	Penekanan pada pemilihan Cawapres Boediono yang menimbulkan isu dan kontroversi, sehingga menghilangkan kepercayaan PKS terhadap Boediono
<i>Moral Evaluation</i>	Pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden tidak menunjukkan prinsip kesetaraan pada partai koalisi dan tidak adanya alasan rasionalitas untuk mendukung Boediono
<i>Treatment Recommendation</i>	Rekomendasi permasalahan ini yaitu penyampaian alasan SBY terhadap pemilihan Boediono sehingga PKS dan PD dapat mesra kembali

Sumber: Analisis Peneliti dari Media Indonesia *Online*

2. *Frame Republika Online* : Pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden SBY tepat untuk masa pemerintahan mendatang dilihat dari segi ekonomi, politik, dan kepentingan bangsa Indonesia.

Republika Online mengkonstruksi pemberitaan Deklarasi SBY-Boediono dengan nada positive yang memandang SBY-Boediono merupakan pasangan yang tepat dan ideal untuk pemerintahan mendatang untuk kepentingan dan bangsa di Indonesia. Karena antar SBY-Boediono terdapat keseimbangan antara politik dan ekonomi. *Republika online* juga melihat bahwa Boediono merupakan sosok yang tepat untuk Calon Wakil presiden SBY pada masa pemerintahan mendatang yang dilihat dari segi ekonomi, politik, dan kepentingan bangsa Indonesia. Dalam pemberitaanya *Republika Online* memosisikan sebagai Pendukung atau menyetujui pencalonan Boediono sebagai Cawapres, dengan menonjolkan mengenai perbaikan dan pemulihan ekonomi yang dapat dilakukan oleh Boediono yang merupakan sosok ekonom yang sukses dengan kebijakan –kebijakan sebelumnya sebagai Gubernur BI. Hal ini dapat dilihat dalam berita yang dimuat *Republika online* pada tanggal 15 –22 Mei 2009, *Republika online* menuliskan pemberitaan mengenai Deklarasi SBY-Boediono dilihat dari aspek perekonomian, politik, dan kepentingan kesatuan bangsa. dengan judul **“SBY-Boediono Dinilai Tepat Untuk Perbaikan Ekonomi”**. **“PKS Terima Alasan Yudhoyono Gandeng Boediono”**. Untuk memperkuat konstruksi pemberitaan Deklarasi SBY-Boediono dari sisi pro, *Republika online* juga

menampilkan pemberitaan dengan judul, **“INACA: Boediono Mampu Bawa Perubahan Ekonomi”**, dan **“PKS: Ini Cuma Masalah Komunikasi”**

Menurut Robert N. Entman untuk menganalisis *framing* dalam pemberitaan media menggunakan seleksi isu, penonjolan aspek tertentu dari *isu*, *define problem*, *diagnose cause*, *make moral judgement*, *treatment recommendation*. Konsepsi mengenai *framing* dari Entman tersebut menggambarkan secara luas bagaimana peristiwa dimaknai dan ditandai oleh wartawan.

Dalam konsepsi Entman, *framing* pada dasarnya merujuk pada pemberian defenisi, penjelasan, evaluasi dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Adapun analisis *framing* dengan menggunakan analisis Robert N. Entman pada judul pemberitaan mengenai **“SBY-Boediono Dinilai Tepat Untuk Perbaikan Ekonomi”** adalah sebagai berikut:

Pemilihan *headline* yang berjudul **“SBY-Boediono Dinilai Tepat Untuk Perbaikan Ekonomi”** oleh Republika *online* seolah-olah mampu menggiring pikiran publik tentang pasangan SBY-Boediono. Dalam *headline* tersebut terlihat bahwa hanya pasangan ini yang mampu memberikan pencerahan dan perbaikan terhadap carut marutnya perekonomian bangsa kita. Ada dua tema yang ditonjolkan pada pemberitaan ini. *Pertama*, pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil

Presiden sangat tepat untuk perbaikan ekonomi. Penonjolan ini didukung dengan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Boediono pada waktu menjadi Gubernur Bank Indonesia. Penonjolan pada pemberitaan Republika *online* berkaitan dengan sosok Boediono yang dirasakan dapat memberikan kesuksesan dalam perbaikan ekonomi. Penonjolan tersebut seperti kutipan isi media dibawah ini:

Dipilihannya Boediono menjadi Cawapres oleh SBY, tentu akan lebih peka terhadap kesejahteraan rakyat melalui perbaikan ekonomi. Terkait, selama ini banyak kebijakan ekonomi yang baik dikeluarkan Gubernur Bank Indonesia itu, di antaranya dalam penurunan tingkat suku bunga bank dan lainnya.

Kedua, penonjolan aspek kedua pada pemberitaan ini mengenai keseimbangan ekonomi dan politik. Dalam pemberitaan ini, Republika *online* mengungkapkan permasalahan atau isu dengan menonjolkan bahwa perlunya keseimbangan politik dan ekonomi. Dengan adanya keseimbangan politik dan ekonomi maka akan mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap pemerintahan dan perbaikan ekonomi. Republika *online* menonjolkan keseimbangan politik dan ekonomi ini dikarenakan sosok Boediono merupakan sosok yang tidak pernah muncul dalam politik, sehingga dengan munculnya Boediono sebagai Calon Wakil presiden dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap pemerintahan dan perbaikan ekonomi untuk bangsa dengan stabilitas politik dan ekonomi.

Define Problem. Frame yang dikembangkan oleh Republika *online* pada pemberitaan ini yaitu masalah ekonomi rakyat. Republika

online dalam pemberitaan ini menonjolkan mengenai permasalahan ekonomi kerakyatan karena pada tujuan akhirnya yaitu untuk memberikan kesejahteraan ekonomi pada rakyat dan tetap memegang teguh prinsip ekonomi kerakyatan. Ada beberapa alasan mengapa kita mengatakan bahwa bingkai ekonomi rakyat sebagai bingkai yang dominan dalam pemberitaan ini. *Pertama*, Pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden dalam pemberitaan ini diungkapkan secara jelas tentang misi dan visi seorang Boediono sebagai Calon Wakil Presiden yang akan melakukan perubahan dan perbaikan pada perekonomian Negara kita. Ada beberapa kutipan dalam berita ini yang mengungkapkan sisi-sisi positif Boediono yang mampu meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan ekonomi rakyat sebagai berikut:

Pengamat Ekonomi dari Universitas Bung Hatta (UBH) Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Dr. Syafrizal Chan menilai jatuhnya pilihan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Boediono untuk maju dalam Pilpres mendatang cukup tepat dilihat dari sisi perbaikan ekonomi bangsa ke depan.

Pada bagian lain, *Republika online* bahkan menyitir pendapat Syafrizal yang menyatakan bahwa Boediono mungkin akan lebih peka terhadap kesejahteraan rakyat melalui perbaikan ekonomi pada masa pemerintah yang mendatang. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan mungkin dapat dijadikan contoh yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan kebijakan dan peraturan yang akan dikeluarkan pada masa pemerintahan berikutnya. Seperti di dalam kutipan sebagai berikut:

Dipilihnya Boediono menjadi Cawapres oleh SBY, tentu akan lebih peka terhadap kesejahteraan rakyat melalui perbaikan ekonomi.

Kedua, Untuk melihat masalah ini sebagai pembingkai masalah ekonomi rakyat ditunjukkan dengan sumber wawancara yang merupakan pengamat ekonom dari Universitas Bung Hatta (UBH) Padang yang berbicara dalam ranah perekonomian. Hasil wawancara dengan pengamat ekonomi dituliskan oleh *Republika online* dengan tujuan akhir yang harus dicapai yaitu kesejahteraan ekonomi pada rakyat dengan pemilihan SBY terhadap Boediono sebagai Calon Wakil Presiden yang akan memberikan kontribusi yang baik terhadap perbaikan ekonomi di Indonesia. *Republika online* mengungkapkan hasil wawancara dengan jelas dan terperinci bahwa pasangan tersebut merupakan pasangan yang ideal dan sangat tepat untuk memperbaiki carut marutnya perekonomian di Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa pendefinisian masalah pada *Republika online* mengungkapkan bahwa pilihan SBY terhadap Boediono mampu meningkatkan kepekaan terhadap kesejahteraan rakyat. Pasangan SBY-Boediono merupakan pasangan yang mampu menjadi Presiden dan Wakil Presiden dengan perbaikan ekonomi untuk bangsa kita yang tepat dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat.

Causal interpretation. Memperkirakan masalah atau sumber masalah yang dianggap sebagai penyebab masalah serta aktor yang dianggap sebagai penyebab masalah. Dalam keseluruhan berita

Republika *online*, aktor atau pelaku yang mempunyai peranan penting dalam pemberitaan ini yaitu SBY dan Boediono. Pada pemberitaan ini Republika mengungkapkan bahwa pemilihan SBY terhadap Boediono sebagai Calon Wakil Presiden merupakan keputusan yang tepat.

Pemberitaan yang ditulis oleh Republika *online* diungkapkan dengan jelas dan rinci tentang pelaku atau aktor yang mempunyai peranan penting dalam perbaikan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Letak awal permasalahan dalam pengungkapan berita ini yaitu pemilihan dan desas-desus pasangan atau pendamping SBY sebagai Calon Wakil Presiden. Banyaknya desas-desus dan informasi tentang Calon Wakil Presiden yang kemudian terpilihnya Boediono yang bukan dari partai politik menimbulkan berbagai kontroversi. Republika *online* menulis hal-hal positif tentang pemilihan Boediono yang tepat sebagai Cawapres dengan tujuan memperbaiki kesejahteraan rakyat kedepan Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah ini:

Dr Syafrizal Chan menilai jatuhnya pilihan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Boediono untuk maju dalam Pilpres mendatang cukup tepat dilihat dari sisi perbaikan ekonomi bangsa kedepan

Selain itu, Republika *online* juga menuliskan hal-hal positif tentang Boediono yang mampu mempengaruhi pikiran dan pendapat pembaca mengenai pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden berkaitan dengan perbaikan ekonomi. Republika *online* menulis secara jelas alasan tepatnya pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden

dengan tujuan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. *Republika online* melihat bahwa Boediono merupakan sosok yang tepat dan peka untuk kesejahteraan ekonomi rakyat. Hal ini terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan selama jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. *Republika online* menuliskan bukti kebijakan dan kesuksesan Boediono ketika ia menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Kesuksesan tersebut diyakini mampu menjadi contoh untuk tindakan atau kebijakan yang dikeluarkan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden pada masa pemerintahan mendatang bersama SBY. Hasil kutipan dapat dilihat pada kutipan dibawah ini:

Dipilihnya Boediono menjadi Cawapres oleh SBY, tentu akan lebih peka terhadap kesejahteraan rakyat melalui perbaikan ekonomi. Terkait, selama ini banyak kebijakan ekonomi yang baik dikeluarkan Gubernur Bank Indonesia itu, di antaranya dalam penurunan tingkat suku bunga bank dan lainnya.

Selain itu, *Republika online* tidak hanya mengungkapkan kesuksesan Boediono ketika ia menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, melainkan mengungkapkan seorang sosok yang mampu memperbaiki ekonomi nasional dan internasional dengan kebijakan dan peraturan yang akan dikeluarkannya pada kabinet Menkoekuin mendatang.

Selain itu, kehadiran ekonom dan tenokrat (Boediono) yang dikenal oleh pelaku ekonomi makro nasional dan makro internasional, juga akan bisa mengkoordinasikan jajaran Menkoekuin di kabinetnya nanti.

Dalam pemberitaan ini *Republika online* juga mengungkapkan bahwa Boediono bukan merupakan seorang tokoh politik sehingga perlu

dukungan yang penuh dari koalisi partai-partai Demokrat untuk mewujudkan stabilitas ekonomi dan politik. Sehingga dibutuhkan kewenangan serta pejelasan SBY tentang pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden untuk tetap menggandeng partai-partai koalisi Partai Demokrat. *Republika online* menuliskan bahwa peran SBY untuk meyakini partai politik sangat besar untuk perwujudan stabilitas ekonomi dan politik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan berpedoman kepada ekonomi kerakyatan. Seperti dalam kutipan di bawah ini:

Sangat penting bagi SBY dan PD untuk memberikan penjelasan dan meyakinkan partai politik (Parpol) mitra koalisinya tersebut, sehingga bisa diterima

Dari sini sudah mulai kelihatan, bagaimana *Republika online* membingkai bahwa pasangan SBY-Boediono mampu dan tepat dalam perbaikan ekonomi dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam berita ini dijelaskan secara rinci alasan-alasan yang tepat dalam pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden dan peran SBY untuk mampu memberikan penjelasan terhadap partai-partai politik yang berkoalisi dengan partai Demokrat. Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa aktor atau pelaku yang berperan dalam pemberitaan ini yaitu SBY dan Boediono dengan akar permasalahan pemilihan Boediono yang tepat sebagai cawapres untuk pemilu mendatang dengan melihat kesuksesan pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya selama menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia diyakini mampu

memberikan pencerahan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat.

Moral Evaluation. Elemen *framing* yang dipakai untuk membenarkan/memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Ada beberapa argumentasi pada pemberitaan Republika *online* yang terkait dengan pasangan SBY-Boediono merupakan pasangan yang tepat dalam perbaikan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. *Pertama*, kerjasama SBY dan Boediono dalam Capres dan Cawapres pada pemilu mendatang memberikan kontribusi yang baik pada perbaikan ekonomi yang tepat dan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Banyak alasan SBY memilih Boediono yang bukan merupakan sosok dari partai politik dengan pengalaman-pengalaman ekonomi yang pernah dilakukan dan merupakan sosok satu-satunya yang pas untuk mendampingi SBY dalam pemerintahan mendatang.

Kedua. Boediono merupakan sosok yang tepat sebagai Calon Wakil Presiden. Hal ini terkait dengan Boediono menjadi Cawapres SBY, tentu akan lebih peka terhadap kesejahteraan rakyat melalui perbaikan ekonomi. Terkait, selama ini banyak kebijakan ekonomi yang baik dikeluarkan Gubernur Bank Indonesia itu, di antaranya dalam penurunan tingkat suku bunga bank dan lainnya. Selain itu kehadiran

ekonom dan tenokrat (Boediono) yang dikenal oleh pelaku ekonomi makro nasional dan makro internasional, juga akan bisa mengkoordinasikan jajaran Menko-ekuin di kabinetnya nanti.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan selama menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia mampu menjadi tolak ukur kesuksesan keberhasilannya sebagai Calon Wakil Presiden untuk perbaikan ekonomi mendatang. Boediono diyakini mampu menjadi sosok yang tetap berpegang teguh pada ekonomi kerakyatan dan peka terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat.

Treatment Recommendation. Elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan atau jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan. Dalam pemberitaan ini *Republika online* memberikan suatu solusi bahwa harus adanya stabilitas politik dan ekonomi dengan dukungan pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden yang dapat mengarah kesuksesan pada ekonomi pembangunan dengan berpegang pada ekonomi kerakyatan. Seperti pada kutipan di bawah ini:

Jadi, politik ke depan harus mengarah pada ekonomi pembangunan yang mengedepankan ekonomi kerakyatan, tentunya harus mendapatkan dukungan parlemen dan konstitusi.

Kutipan akhir tersebut mengungkapkan bahwa *Republika online* merekomendasikan untuk memegang teguh pada prinsip ekonomi kerakyatan dengan dukungan dan stabilitas ekonomi dan politik. Hal ini dikarenakan keseimbangan antara ekonomi dengan politik yang sangat

	sosok dari partai politik dengan pengalaman-pengalaman ekonomi yang pernah dilakukannya merupakan sosok satu-satunya yang pas untuk mendampingi SBY dalam pemerintahan mendatang.
<i>Treatment Recommendation</i>	Diperlukan dukungan politik terhadap Boediono sebagai Calon Wakil Presiden agar terdapat keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan politik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat kedepan dan tetap memegang teguh pada prinsip ekonomi kerakyatan.

Sumber: Analisis Peneliti dari *Republika Online*

Apabila melihat pbingkaian dalam berita Deklarasi SBY-Boediono *Republika online* berupaya untuk mengkonstruksi pikiran pembaca dengan menonjolkan suatu isu positive di balik pemberitaan mengenai Deklarasi SBY-Boediono. Salah satu berita tentang Deklarasi SBY-Boediono yaitu tentang koalisi partai PKS dan alasan PKS untuk mendukung SBY sebagai Calon Presiden dan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden. *Republika online* menuliskan judul berita dengan kalimat **“PKS Terima Alasan Yudhoyono Gandeng Boediono”**, Dari judul tersebut sudah terlihat bagaimana pandangan *Republika online* terhadap Deklarasi SBY-Boediono. Pandangan ini juga yang digunakan *Republika online* untuk mengkonstruksi pikiran pembaca agar senada dengan pandangan *Republika online* yang menyatakan bahwa pencalonan pasangan SBY-Boediono sebagai Capres dan Cawapres merupakan pasangan yang ideal untuk perbaikan perekonomian mendatang serta dukungan dari beberapa partai koalisi memberikan kesolidan terhadap pemilihan Capres dan Cawapres SBY-Boediono yang menunjukkan persatuan bangsa.

Pemberitaan mengenai **“PKS Terima Alasan Yudhoyono Gandeng Boediono”** akan dianalisis dengan menggunakan analisis *framing* Robert N. Entman. Adapun analisis *framing*nya adalah sebagai berikut:

Pemilihan *headline* dengan judul berita **“PKS Terima Alasan Yudhoyono Gandeng Boediono”**, terlihat bahwa *Republika online* ingin membangun atau membentuk pikiran pembaca bahwa PKS tidak mempermasalahkan terhadap terpilihnya Boediono sebagai Calon wakil Presiden serta tetap melanjutkan koalisi partai untuk mendukung SBY sebagai Calon Presiden untuk masa pemerintahan mendatang.

Penonjolan aspek pada isu atau permasalahan dalam pemberitaan ini berkaitan dengan alasan-alasan yang diungkapkan oleh SBY untuk memilih Boediono sebagai Calon wakil Presiden. *Republika online* menulis hasil wawancara dengan ketua PKS yang menonjolkan alasan Boediono sebagai sosok Calon Wakil Presiden yang cocok mendampingi SBY dalam perbaikan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada kutipan isi media sebagai berikut di bawah ini:

Alasan Yudhoyono menggandeng Boediono untuk cawapresnya, Kata dia sebagai upaya mengatasi krisis ekonomi global yang masih akan berdampak dalam beberapa tahun ke depan. Boediono yang berpengalaman dalam masalah ekonomi diharapkan bisa memberikan perbaikan bagi Indonesia ke depan. “Intinya Pak Yudhoyono butuh teman yaag bisa membantunya dalam mengatasi masalah ekonomi”, kata Tiffatul Sembiring

Dari kutipan tersebut terlihat penonjolan isu atau permasalahan yang berkaitan dengan alasan dipilihnya Boediono sebagai Calon Wakil

Presiden oleh SBY. Dari kutipan di atas terlihat dengan jelas bahwa *Republika online* menuliskan pemberitaan ini dengan menonjolkan sosok Boediono yang cocok sebagai Calon Wakil Presiden untuk menangani masalah ekonomi bangsa Indonesia kedepan.

Problem identification. *Republika online* mengidentifikasi permasalahan dalam pemberitaan ini mengenai PKS menerima alasan SBY dan tetap mendukung SBY untuk menjadi Calon Wakil Presiden serta menerima Boediono sebagai Calon Wakil Presidennya. Identifikasi permasalahan dalam pemberitaan ini meliputi masalah perekonomian. *Republika online* menyajikan pemberitaan tentang penerimaan PKS terhadap alasan SBY memilih Boediono secara dominan dibingkai dalam pemberitaan perekonomian. Ada beberapa alasan kenapa mengatakan bahwa bingkai pemberitaan ini yaitu perekonomian yang merupakan bingkai yang paling dominan dalam pemberitaan ini. *Pertama*, semua masalah berkaitan dengan permasalahan perekonomian di Negara Indonesia. *Republika online* menulis beberapa alasan SBY memilih Boediono sebagai Calon Wakil Presiden yang sangat berkaitan erat dengan masalah perekonomian bangsa. Boediono merupakan sosok yang mampu memberikan pembaharuan terhadap carut marutnya perekonomian bangsa. Alasan tentang perbaikan ekonomi ini, menimbulkan pemaknaan bahwa pemilihan SBY merupakan kepentingan bangsa dan Negara untuk perbaikan ekonomi.

Alasan-alasan SBY ditulis secara jelas oleh *Republika online* pada kutipan di bawah ini:

Alasan Yudhoyono menggandeng Boediono untuk cawapresnya, kata dia sebagai upaya mengatasi krisis ekonomi global yang masih akan berdampak dalam beberapa tahun ke depan. Boediono yang berpengalaman dalam masalah ekonomi diharapkan bisa memberikan perbaikan bagi Indonesia ke depan.

Dari kutipan di atas terlihat jelas bahwa alasan utama untuk menunjuk Boediono sebagai Calon Wakil Presiden sebagai solusi dalam perbaikan ekonomi. *Kedua*, sebagai konsekuensi dari melihat pemberitaan ini sebagai permasalahan perekonomian terlihat dari hasil wawancara dan pengharapan dari sumber informasi. Sumber berita yang dijadikan acuan oleh *Republika online* dalam penulisan kali ini merupakan sosok pengamat politik yaitu ketua PKS. Hal ini seperti pada kutipan di bawah ini:

Menurut Tiffatul, diharapkan pasangan ini bisa menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi yang dihadapi bangsa ini.

Dari pernyataan yang dikutip dalam kalimat tersebut, terlihat jelas bahwa pasangan SBY-Boediono merupakan pasangan yang dapat menjadi solusi perekonomian, sehingga PKS mempunyai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tetap berkoalisi dan mendukung SBY dan Boediono sebagai Capres dan Cawapres pada pemilihan umum mendatang. Selain itu, *Republika online* juga menulis tentang kedaulatan yang akan diusung oleh PKS dan SBY. Dalam pemberitaan ini juga terlihat jelas PKS menggarisbawahi kedaulatan ekonomi yang tidak dicampuri pihak asing. Hal tersebut sesuai dengan kutipan di bawah ini:

Dalam pertemuan itu, PKS ingin menggarisbawahi kedaulatan termasuk kedaulatan ekonomi yang tidak dicampuri pihak asing

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas dapat terlihat bahwa identifikasi permasalahan secara keseluruhan pada pemberitaan ini mengenai perekonomian bangsa. Dalam pemberitaan ini terlihat jelas bahwa Boediono dipilih sebagai Calon Wakil Presiden oleh SBY dengan alasan untuk perbaikan perekonomian tanpa ada campur tangan dari pihak asing. Adanya beberapa pernyataan tersebut semakin memperjelas konstruksi yang ingin dibangun Republika *online* dalam menyikapi sikap PKS yang menerima alasan SBY untuk menggandeng Boediono. Republika *online* mengkonstruksi bahwa PKS tetap berkoalisi dengan SBY dan mendukung Boediono sebagai cawapres pada pemilihan umum mendatang.

Causal Interpretation. Dalam keseluruhan berita, Republika *online* memposisikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Calon Presiden dan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden merupakan pelaku atau aktor penyebab permasalahan dalam pemberitaan ini. Kedua tokoh ini ditempatkan sebagai penyebab yang mengakibatkan timbulnya berbagai kontroversi terhadap pemilihan Boediono yang bukan dari partai koalisi Demokrat.

Letak awal permasalahan pada masalah yang berkaitan dengan PKS menerima alasan SBY pilih Boediono untuk menjadi Calon Wakil Presiden. Pemilihan Boediono sebagai Calon wakil Presiden menimbulkan beberapa kontroversi karena Boediono dinilai merupakan

sosok yang bukan berasal dari partai politik sehingga PKS merasa ragu untuk berkoalisi dengan SBY. Akan tetapi *Republika online* mengisahkan beberapa fakta terhadap alasan SBY untuk memilih Boediono. Yang menunjukkan bahwa Koalisi tersebut tetap berjalan dikarenakan alasan-alasan SBY yang rasional dan mampu memberikan keyakinan terhadap Tiffatul selaku ketua PKS. Hal ini sesuai dengan hasil kutipan pada pemberitaan *Republika online* sebagai berikut:

“Kami melakukan pertemuan selama hampir sejam dan mendapat penjelasannya dan bisa menerima sehingga kami melanjutkan koalisi ini”, kata Tiffatul Sembiring sesuai Deklarasi SBY Ber-Boedi di Sasana Budaya (Sabuga) ITB Kota Bandung, Jumat malam.

Dengan penulisan pernyataan secara tegas dan mendetail tentang pertemuan yang diadakan oleh pihak PKS dengan SBY maka diharapkan timbul suatu kesan dalam pandangan khalayak bahwa pendapat untuk tetap berkoalisi merupakan suatu hal yang tepat untuk dilakukan dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan sehingga PKS tetap berkoalisi dengan Demokrat dalam mendukung SBY dan Boediono sebagai Capres dan Cawapres pada pemilu mendatang.

Pernyataan untuk tetap koalisi terhadap dukungan SBY-Boediono juga dituliskan oleh *Republika online* secara mendetail dan jelas pada kutipan di bawah ini:

PKS diwakili oleh Ketua Majelis Syuro KH Hilmy Aminuddin, Presiden PKS Tiffatul Sembiring dan Sekjen Anis Matta. Ketika ditanya keputusan PKS mendukung pasangan SBY-Boediono terhadap keutuhan dukungan di partai, dengan tegas menyatakan PKS tetap utuh.

Dari sini mulai terlihat bagaimana Boediono yang merupakan sosok Calon Wakil Presiden mendapat kontroversi atau penolakan sehingga menimbulkan permasalahan terhadap koalisi PKS dan SBY. Akan tetapi dalam pemberitaan ini dikembangkan dengan jelas alasan-alasan SBY dalam memilih Boediono sebagai Calon Wakil Presiden yang diterima oleh PKS, sehingga memutuskan untuk tetap berkoalisi dengan partai Demokrat dan mendukung SBY-Boediono.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa *causal interpretation* dalam pemberitaan ini yaitu Boediono dan SBY sebagai pasangan yang didukung oleh PKS dengan harapan bahwa pasangan ini mampu memberikan solusi dalam perekonomian dan perbaikan ekonomi rakyat. Keputusan tersebut didasari untuk kepentingan bangsa dan Negara, sehingga PKS tetap akan melanjutkan koalisi dengan SBY dan Boediono serta tetap mendukung pasangan Capres dan Cawapres tersebut.

Moral evaluation. Aspek ini merupakan salah satu analisis *framing* yang bertujuan untuk melakukan penilaian atas penyebab masalah. Penilaian terhadap Boediono dan SBY sebagai sumber permasalahan bagi koalisi partai khususnya koalisi partai PKS dikarenakan beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut *Pertama*, dipilihnya Boediono sebagai Calon Wakil Presiden yang bukan merupakan sosok dari partai politik membuat PKS harus berpikir dan mengkaji ulang dalam membentuk suatu hubungan koalisi dengan

Demokrat yang akan mengusung SBY sebagai Calon Presiden. Hal ini disebabkan karena tidak terpilihnya nama-nama Calon Wakil Presiden yang diusulkan dari partai PKS sehingga membuat keraguan untuk berkoalisi dalam pemilu Capres dan Cawapres. Akan tetapi hal ini tidak dapat bertahan lama setelah penjelasan SBY sebagai Capres dalam memilih Boediono sebagai Cawapres yang bertujuan dalam perbaikan dan pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. .

Kedua, Pada pemberitaan ini *Republika online* mengungkapkan penilaian terhadap kesalahan SBY yang memilih Boediono sebagai Calon Wakil Presiden ditebus dengan melakukan perundingan atau pertemuan bersama dengan PKS untuk mempertahankan koalisi partai. Pertemuan tersebut mengungkapkan beberapa alasan rasional SBY dalam memilih Boediono dan hanya sosok Boediono yang mampu memberikan perbaikan dalam ekonomi Negara Kita. Pertemuan tersebut diungkapkan dalam *Republika online* sebagai berikut:

Kami melakukan pertemuan selama hampir sejam dan mendapat penjelasannya, dan bisa menerima sehingga kami melanjutkan koalisi ini," kata Tiffatul Sembiring se usai Deklarasi SBY Ber-Boedi di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB Kota Bandung, Jumat malam.

Dari pernyataan tersebut *Republika online* mengungkapkan secara jelas dan rinci tentang pertemuan yang diadakan antara PKS dengan Demokrat yang mengusung tema alasan penerimaan SBY terhadap Boediono. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa penilaian dari penyebab sumber permasalahan

yang diberitakan oleh *Republika online* sehingga mampu memberikan pengaruh pikiran pembaca dengan menanamkan bahwa SBY dan Boediono merupakan pasangan yang ideal dalam pemilu Capres dan Cawapres dengan dukungan partai koalisi Islam yang termasuk partai dengan suara terbesar pada pemilu sebelumnya.

Treatment Recommendation. Menjastifikasi atau menawarkan suatu cara dalam menanggulangi masalah serta memprediksi hasil dari suatu permasalahan. Pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden menimbulkan penolakan dan tantangan dari PKS tanpa memperhatikan alasan yang diungkapkan oleh SBY. Atas semua permasalahan tersebut, maka *Republika online* merekomendasikan bahwa perlunya tim yang solid untuk mendukung SBY dan Boediono sebagai Capres dan Cawapres dengan tujuan kedaulatan Bangsa dan Negara serta perbaikan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Berikut ini dikutip tentang rekomendasi penyelesaian permasalahan yaitu sebagai berikut:

Ketika ditanya keputusan PKS mendukung pasangan SBY-Boediono terhadap keutuhan dukungan di partai, dengan tegas menyatakan PKS tetap utuh. "Keputusan ini didasari untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Presiden PKS itu menambahkan.

Kutipan di atas ditulis pada akhir pemberitaan oleh *Republika online* dengan harapan sebagai rekomendasi untuk mendukung pasangan SBY dan Boediono dengan dukungan penuh dari PKS, rekomendasi ini bertujuan untuk kepentingan bangsa dan Negara. *Republika online* menulis pernyataan tersebut pada bagian akhir dengan upaya untuk

memberikan suatu rekomendasi atau solusi dalam permasalahan ini yang mampu mengkonstruksi pikiran pembaca.

Adapun ringkasan hasil analisis *framing* dengan menggunakan analisis Robert N. Entman dalam judul pemberitaan “**PKS Terima Alasan Yudhoyono Gandeng Boediono**” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Ringkasan Analisis Framing Robert N. Entman untuk Pemberitaan
PKS Terima Alasan Yudhoyono Gandeng Boediono

Elemen	Republika Online
<i>Frame</i>	
Alasan pemilihan Boediono sebagai Cawapres SBY adalah solusi untuk memperbaiki permasalahan ekonomi bangsa Indonesia kedepan.	
<i>Problem Identification</i>	Penerimaan sikap PKS terhadap SBY dengan ungkapan berbagai alasan SBY dalam pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden dan PKS memutuskan tetap melanjutkan koalisi dengan partai Demokrat pada pemilu
<i>Causal Interpretation</i>	Penekanan pada alasan-alasan pemilihan Boediono sebagai calon wakil presiden yang mencakup permasalahan perekonomian bangsa. Alasan tersebut menekankan bahwa Boediono sebagai Calon Wakil Presiden mampu bekerjasama dengan SBY dalam memperbaiki carut marut perekonomian bangsa kedepan.
<i>Moral Evaluation</i>	Boediono merupakan sosok profesional dan bukan sosok politik sehingga tidak cocok menduduki jabatan Calon Wakil Presiden akan tetapi dengan pengalamannya dalam masalah ekonomi diharapkan bisa memberikan perbaikan bagi Indonesia ke depannya
<i>Treatment Recommendation</i>	Dukungan penuh dari partai koalisi khususnya PKS dengan menerima alasan-alasan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden untuk masa pemerintahan mendatang sebagai suatu keputusan yang didasari kepentingan bangsa dan Negara

Sumber: Analisis Peneliti dari Republika online

Selain pemberitaan diatas Dalam penelitian ini *Republika online* juga menampilkan sebuah berita pada tanggal 15 Mei 2009 yang berjudul **“INACA: Boediono Mampu Bawa Perubahan Ekonomi”**. Adapun analisis *framingnya* adalah sebagai berikut:

Pemilihan *headline* dengan judul berita **“INACA: Boediono Mampu Bawa Perubahan Ekonomi”** terlihat bahwa *Republika online* ingin membangun atau membentuk pikiran pembaca bahwa pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden SBY tepat untuk masa pemerintahan mendatang dari segi ekonomi dan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan sosok Boediono sebagai pendekar ekonomi yang mampu membawa dan memberikan perubahan pada perekonomian bangsa.

Problem Identification. *Republika online* mengidentifikasi permasalahan yang diungkapkan dalam pemberitaan ini mengenai sosok Boediono yang mampu membawa perubahan perekonomian bangsa. Dalam pemberitaan ini *Republika online* mengambil sumber wawancara atau informasi dari INACA yang menyatakan bahwa Boediono merupakan sosok pendekar ekonomi bangsa. Hal ini sesuai dengan kutipan isi media di bawah ini:

Indonesia National Air Carrier Association (INACA) juga menilai, sosok Gubernur Bank Indonesia, Boediono mampu membawa perubahan ekonomi di Indonesia.

Selain itu, *Republika online* juga menuliskan beberapa kalimat yang mendukung sosok Boediono sebagai pembawa perubahan

perekonomian bangsa. Dari beberapa uraian kalimat ditulis kalimat positif tentang Boediono. Hal ini dapat dilihat pada kutipan isi media di bawah ini.

"Boediono seorang yang baik dan bersih. Ekspektasi pasar akan positif," kata Sekjen INACA, Tengku Burhanuddin ketika dimintai tanggapan seputar rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang disebut-sebut akan berduet dengan Gubernur BI itu, di Jakarta, Kamis. Menurut Tengku, kehadiran seorang teknokrat dan ekonom seperti Boediono, saat ini ke depan sangat diperlukan untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.

Causal Interpretation. Dalam keseluruhan berita Media Indonesia memosisikan SBY sebagai Calon Presiden dan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden merupakan pelaku atau aktor penyebab permasalahan dalam pemberitaan ini. Kedua tokoh ini ditempatkan sebagai sumber permasalahan dalam penyelenggaraan Deklarasi SBY-Boediono.

Letak awal permasalahan pada isu ini yaitu berkaitan dengan penetapan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden yang mendampingi SBY. Pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden mendapatkan respon positif dari INACA dengan mengevaluasi jejak-jejak perekonomian yang pernah dilaksanakan oleh Boediono. Hal ini sesuai dengan kutipan di bawah ini:

Kami yakin, rekam jejak Boediono membuktikan bahwa dia seorang yang tak punya kepentingan A atau B, tetapi dia lurus demi bangsa ini," kata Tengku.

Selain itu, permasalahan yang juga dikaitkan dengan pemilihan Boediono berkaitan dengan perekonomian neoliberalisme. Republika *online* mengungkapkan isi wawancara dengan ketua INACA yang

menyatakan bahwa tudingan tentang neoliberalisme sampai saat ini belum terbukti. Hal ini sesuai dengan kutipan di bawah ini:

Tentang tudingan bahwa Boediono beraliran neo-liberalisme dan tidak pro rakyat tetapi pasar bebas, Tengku mengatakan, sebagai pelaku usaha di bidang penerbangan, rekam jejak Boediono, tak terbukti dia neoliberal.

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa tokoh permasalahan dalam pemberitaan ini terkait dengan pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden yang mendampingi SBY untuk masa pemerintahan mendatang.

Moral evaluation. Penilaian atas Boediono sebagai Calon Wakil Presiden adalah tepat dengan membawa perubahan perekonomian bangsa. *Pertama*, Boediono merupakan sosok ekonom yang telah membuktikan jejaknya yang sukses dalam perekonomian. *Kedua*, Hadirnya Boediono sebagai teknokrat dan politis merupakan suatu solusi untuk memulihkan dan memperbaiki perekonomian bangsa. Hal ini sesuai dengan kutipan di bawah ini.

Menurut Tengku, kehadiran seorang teknokrat dan ekonom seperti Boediono, saat ini ke depan sangat diperlukan untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. "Kami yakin, rekam jejak Boediono membuktikan bahwa dia seorang yang tak punya kepentingan A atau B, tetapi dia lurus demi bangsa ini," kata Tengku.

Treatment Recommendation. *Republika online* dalam tulisannya menjustifikasi suatu permasalahan ini yaitu dengan memberikan solusi bahwa Boediono sebagai Calon Wakil Presiden tepat mendampingi SBY untuk masa pemerinatahan mendatang, sehingga diperlukan dukungan

politik untuk mendukung SBY dan Boediono. Hal ini sesuai dengan kutipan isi media di bawah ini:

Oleh karena itu, dia berharap pihak terkait, khususnya parlemen, mampu memberikan dukungan politik maksimal agar program-program ekonomi berjalan sesuai dengan keinginan bersama.

Adapun ringkasan hasil analisis *framing* dengan menggunakan analisis Robert N. Entman dalam judul pemberitaan “**INACA: Boediono Mampu Bawa Perubahan Ekonomi**” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Ringkasan Analisis *Framing* Robert N. Entman untuk INACA: Boediono Mampu Bawa Perubahan Ekonomi

Elemen	Republika Online
<i>Frame</i> Cawapres Boediono merupakan seorang ekonom sukses untuk pemulihan perekonomian bangsa	
<i>Problem Identification</i>	Pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden sangat tepat untuk pemulihan dan perbaikan perekonomian bangsa.
<i>Causal Interpretation</i>	Pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden mendapatkan respon positif dari INACA dengan mengevaluasi jejak-jejak perekonomian yang pernah dilaksanakan oleh Boediono.
<i>Moral Evaluation</i>	Pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden dikarenakan jejaknya sebagai sosok ekonom yang sukses serta kehadiran sosok teknokrat dan ekonom sangat mendukung pemulihan perekonomian bangsa.
<i>Treatment Recommendation</i>	Rekomendasi permasalahan ini yaitu dukungan politik dari parlemen agar pelaksanaan program-program ekonomi kedepan berjalan dengan baik

Sumber : Analisis peneliti dari *Republika Online*

Selain keempat berita tersebut, *Republika online* juga menulis berita yang berjudul tentang “**PKS: Ini Cuma Masalah Komunikasi**”. Judul pemberitaan tersebut memperkuat konsumsi atau pemikiran pembaca tentang dukungan PKS terhadap pasangan SBY dan Boediono

untuk pemilu mendatang dan tidak mempermasalahkan pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden.

Problem Identification. *Republika online* mengidentifikasi permasalahan yang diungkapkan dalam pemberitaan ini mengenai sikap PKS untuk berkoalisi dengan SBY dalam pemilu mendatang. Dalam pemberitaan ini *Republika online* menuliskan permasalahan yang berkaitan dengan komunikasi pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden dan bukan mempermasalahkan sosok atau *figure* Boediono. Hal ini sesuai dengan kutipan isi media di bawah ini.

Hilmi menegaskan, masalah komunikasi itulah yang menjadi pangkal pokok sikap PKS yang terkesan resisten terhadap pilihan SBY. "Jadi bukan karena figur Pak Boediononya, ini hanya masalah cara berkomunikasi saja.

Causal Interpretation. Dalam keseluruhan berita *Republika online* memosisikan SBY sebagai Calon Presiden yang telah memilih Boediono tanpa melakukan komunikasi dengan partai koalisinya yaitu PKS. Letak awal permasalahan pada isu ini yaitu berkaitan dengan penetapan Boediono sebagai calon wakil presiden yang mendampingi SBY. Pemilihan ini tidak dikomunikasikan dan langsung diberitakan sehingga mengejutkan pihak PKS. Hal ini sesuai dengan kutipan di bawah ini:

PKS tidak menerima cara komunikasi yang dibangun SBY dalam hal penentuan cawapresnya. "Karena kan semula SBY menjanjikan segala sesuatu akan dimusyawarahkan bersama. Nah, kita belum punya kesepakatan tentang itu (Boediono) tapi kok tiba-tiba namanya muncul," kata Hilmi kepada *Republika* di kediamannya di Bandung, Jumat (15/5). Hilmi menegaskan, masalah komunikasi itulah yang menjadi

pangkal pokok sikap PKS yang terkesan resisten terhadap pilihan SBY. “Jadi bukan karena figur Pak Boediononya, ini hanya masalah cara berkomunikasi saja.”

Berdasarkan kutipan di atas terlihat permasalahan dalam pemberitaan ini terkait dengan cara SBY yang tanpa melakukan komunikasi dengan pihak partai koalisi terhadap pemilihan Boediono sebagai Cawapres.

Moral evaluation. Penilaian atas SBY yang telah memilih Boediono sebagai Calon Wakil Presiden ini hanya berkaitan dengan permasalahan politik. Hal ini disebabkan karena salah satu prinsip koalisi partai sehingga perlunya mengkomunikasikan Calon Wakil Presiden yang terpilih. Hal ini sesuai dengan kutipan di bawah ini.

Masalah komunikasi itulah yang menjadi pangkal pokok sikap PKS yang terkesan resisten terhadap pilihan SBY. “Jadi bukan karena figur Pak Boediononya, ini hanya masalah cara berkomunikasi saja.”

Treatment Recommendation. Republika *online* dalam tulisannya menjustifikasi suatu permasalahan ini yaitu dengan memberikan solusi bahwa melakukan komunikasi dengan pihak PKS agar terciptanya suatu kesepakatan pada pendukung SBY dan Boeidonono dan hubungan baik antara PKS dan PD. Hal ini sesuai dengan kutipan isi media di bawah ini:

Koalisi antara PKS dan PD masih tetap bisa terwujud bilamana terjadi kesepakatan tentang arah koalisi ke depan

Adapun ringkasan hasil analisis *framing* dengan menggunakan analisis Robert N. Entman dalam judul pemberitaan “**PKS: Ini Cuma Masalah Komunikasi**” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Ringkasan Analisis *Framing* Robert N. Entman untuk PKS: Ini
Cuma Masalah Komunikasi

Elemen	Republika <i>Online</i>
<i>Frame</i>	
PKS tidak mempersoalkan figure Boediono tetapi cara komunikasi SBY terhadap pemilihan Boediono	
<i>Problem Identification</i>	PKS mempersalahkan cara komunikasi SBY dalam pemilihan Boediono sebagai Capres dan tidak mempersalahkan figure Boediono
<i>Causal Interpretation</i>	SBY sebagai Calon Presiden yang telah memilih Boediono tanpa melakukan komunikasi dengan partai koalisinya yaitu PKS
<i>Moral Evaluation</i>	Pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden seharusnya dilaksanakan dengan musyawarah dan komunikasi pada partai-partai koalisi
<i>Treatment Recommendation</i>	Rekomendasi permasalahan ini yaitu kesepahaman antara PKS dan PD untuk melanjutkan koalisi dan mendukung SBY dan Boediono sebagai Capres dan Cawapres mendatang

Sumber: Analisis peneliti dari *Republika online*

3. Perbandingan *Frame* Media Indonesia *Online* dan *Republika Online*

Perbandingan antara *frame* Media Indonesia *online* dan *Republika online* ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pemberitaan dan sudut pandang kedua media *online* tersebut dalam melihat realitas yang sama. Adapun perbandingan kedua *frame* media *online* tersebut yaitu:

Tabel 3.11
Ringkasan Analisis *Framing* Robert N. Entman untuk Perbedaan
Framing* Media Indonesia *Online* dan *Republika Online

Elemen	Media Indonesia <i>Online</i>	Republika <i>Online</i>
<i>Frame</i>	Pemilihan Boediono sebagai Calon wakil Presiden SBY tidak tepat untuk Masa Pemerintahan Mendatang dilihat dari segi ekonomi politik, serta tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa	Pemilihan Boediono sebagai Calon wakil Presiden SBY tepat untuk Masa Pemerintahan Mendatang yang melihat dari segi ekonomi politik dan kepentingan bangsa Indonesia

	bangsa	
<i>Problem Identification</i>	Boediono yang dipilih sebagai Calon Wakil Presiden tidak pantas sebagai Calon Wakil Presiden SBY. Boediono yang menganut sitem perekonomian neoliberal tentunya bertolak belakang dengan perekonomian kerakyatan di Indonesia	Boediono sebagai Calon Wakil Presiden SBY cocok dan ideal untuk masa pemerintahan mendatang. Boediono yang merupakan sosok teknokrat, profesioanl dan ekonom dapat memulihkan perekonomian bangsa Indonesia kedepan.
<i>Causal Interpretation</i>	Penekanan pada pemilihan Boediono sebagai sosok professional yang tidak sesuai dengan jabatan sebagai Cawapres dan pemilihan boediono tidak mencerminkan keterwakilan umat, dan persatuan bangsa.	Penekanan pada pemilihan Boediono yang tepat dengan tolak ukur kesuksesan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ketika menjabat sebagai Gubernur BI. Pemilihan Boediono merupakan solusi dalam perbaikan perekonomian dan untuk kepentingan bangsa.
<i>Moral Evaluation</i>	Boediono dari kalangan professional yanga bukan berasal dari kalangan politis dapat menurunkan dukungan politik terhadap SBY dan berpotensi memecah belah kabinet.	Pemilihan Boediono dapat memberikan keseimbangan antara stabilitas poltik dan ekonomi. Boediono yang bukan berasal dari partai politik lebih peka terhadap kesejahrenaan rakyat melalui perbaikan ekonomi.
<i>Treatment Recomondation</i>	Mengganti Boediono sebagai Calon Wakil Presiden dan pemilihan Cawapres untuk SBY dari kalangan politik.	Mendukung dan mempertahankan Boediono sebagi Calon Wakil Presiden yang mendampingi SBY

Sumber: Analisis peneliti pada Media Indonesia *Online* dan Republik *Online*, 2009

Dari beberapa judul yang diangkat oleh kedua media *online* di atas, maka sudapat dapat dilihat kedua media tersebut menanggapi permasalahan ini secara berbeda. Media Indonesia *online* melihat bahwa Pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden SBY tidak tepat untuk Masa Pemerintahan Mendatang dilihat dari segi ekonomi politik, serta tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa. Media Indonesia *online*

mengambil sumber informasi dari berbagai sumber baik itu pengamat politik maupun ekonomi.

Berbeda halnya dengan *Republika online* yang membingkai pemberitaan Deklarasi SBY dan Boediono bahwa pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden SBY tepat untuk Masa Pemerintahan Mendatang yang dilihat dari segi ekonomi politik dan kepentingan bangsa Indonesia. Hal ini berkaitan dengan sosok Boediono sebagai ekonom sukses, teknokrat dan professional yang mampu membawa perubahan dan pemulihan perekonomian bangsa Indonesia lima tahun kedepan.

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERBEDAAN PEMBERITAAN PADA MEDIA INDONESIA *ONLINE* DAN REPUBLIKA *ONLINE*

Terdapat perbedaan pemberitaan atau pandangan media massa dalam mengkonstruksi pemberitaan Deklarasi SBY-Boediono. Khususnya kedua media *online* yang telah dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini, yakni Media Indonesia *online* dan *Republika online*. Perbedaan pemberitaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi media dalam menurunkan isi pemberitaan. Shoemaker dan Reese (1996:65). Faktor internal media dipengaruhi oleh para pekerja media, kegiatan rutin media, organisasi media dan ideologi media. Sementara dari faktor ekstramedia yang mempengaruhi media adalah sumber berita dan sumber penghasilan, serta pemerintah (eksternal).

Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa realitas media bukanlah refleksi jernih atas realitas sosial. Realitas media sangat dipengaruhi oleh kecenderungan dari media itu sendiri, yakni dukungan dan tekanan dari pihak internal dan eksternal serta kepentingan dari pihak internal media tersebut. Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan pemberitaan pada Media Indonesia *online* dan Republika *online* dalam mengkonstruksi Deklarasi SBY-Boediono di SABUGA Bandung 15 Mei 2009.

1. Ideologi Media

Kekuasaan organisasi media erat kaitannya dengan ideologi yang dianut oleh media tersebut. Istilah ideologi mempunyai makna sebagai suatu pandangan kelompok-kelompok sosial tertentu yang menyatakan nilai-nilai kelompok sosial tersebut untuk membela dan memajukan kepentingan-kepentingan mereka (Sunarto dalam Sobur, 2001: 61). Sedangkan ideologi media dapat dipahami sebagai cara pandang yang disepakati bersama dan diwujudkan dari kebijakan serta diciptakan oleh pemilik media untuk mengarahkan industrinya demi mencapai kepentingan dan tujuan media tersebut.

Ideologi juga dapat dilihat dalam teks dengan melihat penandaan realitas yang dilakukan media, dari sisi mana media menempatkan/memposisikan dirinya serta penilaian apa yang mereka berikan. Ideologi media dapat dilihat dalam pemberitaan Deklarasi SBY Boediono. Media Indonesia *online* dan Republika *online* memiliki

pandangan yang berbeda dalam memaknai fenomena tersebut. Maka, kedua media massa itu menggunakan ideologi mereka masing-masing dalam mengkonstruksi realitas yang kemudian menyajikannya dalam bentuk berita.

Ideologi Media Indonesia *online* dikenal kritis dan agresif terhadap politik dan pemerintah. Dimana dalam hal ini Media Indonesia *online* mengkritisi pemerintah dalam hal pemilihan Cawapres Boediono untuk masa pemerinthan mendatang yang dianggap tidak tepat. Media Indonesia *online* mempunyai sudut pandang (ideologi) bahwa fungsi media adalah sebagai alat kontrol pemerintah yang tidak mampu memperbaiki sistem pemerintahan yang merosot dan buruk (Keller 2009:46).

Dalam hal ini kaitannya dengan *frame* yang di bentuk Media Indonesia *online* mengenai pemilihan Boediono sebagai Cawapres dinggap memperburuk pemerintahan karena menimbulkan kontroversi serta isu-isu neolibe, pemilihanya Cawapres Boediono ini yang merupakan masalah pada pemerintahan kedepan serta pemerintahan SBY yang lebih mengedepankan perekonomian International dengan memilh Cawpres Boediono yang menganut sistem perekonomian neolibe.

Frame Media Indonesia *online* seperti itu diperkuat dengan pemberitaan Media Indonesia *online* yang selalu menyudutkan Boediono sebagai antek neolibe dan memandang pemelihan Boediono sebagai Cawapres tidak tepat mendampingi SBY untuk masa pemerintahan

mendatang yang dilihat dari segi ekonomi, politik serta pemilihan Boediono sebagai Cawapres tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Bahkan, *Media Indonesia online* juga selalu menampilkan pemberitaan yang kontra terhadap Pemberitaan Deklarasi SBY-Boediono. Hal tersebut dapat dilihat dalam salah satu pemberitaannya dengan kalimat singkat yaitu "SBY dituntut bentuk Kabinet ahli"(*Media Indonesia online* 16/6 2009). dari kalimat tersebut menyatakan akan menjadi percuma jika SBY terpilih lagi menjadi Presiden namun tidak membentuk kabinet dengan merangkul kalangan profesional untuk memperkokoh eksekutif kutipa itu didukung oleh pakar politik Universitas Gajah Mada (UGM), yang artinya memilih Boediono sebagai Cawapres yang berasal dari professional tidak akan memberikan jalan mulus kepada SBY untuk terpilih menjadi Presiden mendatang, selain itu Boediono yang merupakan teknokrat berbeda dengan politisi yang nantinya menjadi masalah terhadap dukungan untuk pemilih.

Ideology Republika online adalah kebangsaan, kerakyatan, dan keislaman, ideology inilah yang sehari-hari dituangkan dalam sajian isi medianya (hamad, 2004:122), *Republika online* ini selalu berusaha menyampaikan nilai-nilai universal, damai dan menjaga persatuan dan kepentingan umat Islam (keller, 2009:63). Pemahaman atas identitas media *Republika online* ini yang menjadi kesepakatan bersama oleh seluruh pekerja media *Republika online* untuk terus bekerja memberikan

pemberitaan yang baik sebagai kontribusi terhadap masyarakat muslim.

Republika *online* melihat pemberitaan Deklarasi SBY-Boediono dari sisi pro terhadap pemilihan Boediono sebagai Calon Wakil Presiden. *Frame* yang dibentuk Republika *online* adalah pemilihan Boediono sebagai Cawapres SBY tepat untuk masa pemerintahan mendatang yang dilihat dari segi ekonomi, politik, dan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Salah satu tujuan Republika *online* membentuk *frame* seperti itu adalah untuk menjaga solidaritas sesama muslim, sehingga Republika *online* memandang Deklarasi SBY-Boediono dari sisi positif karena pasangan tersebut didukung oleh berbagai partai-partai Islam salah satunya adalah PKS, dan PAN. Maka dapat dilihat bahwa Republika *online* memiliki ideologi sebagai media Islam yang berpihak pada yang benar dan mengutamakan kepentingan ummat muslim dalam setiap pemberitaannya.

Hal ini dapat dilihat dari salah satu berita yang diturunkan oleh Republika *online* yaitu "SBY-Boediono dinilai tepat untuk perbaikan ekonomi" (Republika *online* 15 Mei 2009) dari kutipan judul berita tersebut dapat dilihat bahwa pasangan ini dapat memberikan pencerahan dan perbaikan terhadap carut marut perekonomian bangsa kita kedepan, selain itu pemelihan Boediono sebagai Cawapres sangat tepat karena kesuksesannya sebagai ahli ekonomie didukung dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Boediono ketika menjadi Gubernur Bank Indonesia.

2. Sistem Kepemilikan Media

Kepemilikan media masih menjadi faktor penting yang mendasari perbedaan pemberitaan pada setiap media massa. Karena, perbedaan pemikiran, visi dan misi serta tujuan yang ingin dicapai maka dalam perjalanan media massa tersebut harus disesuaikan dengan kepentingan pemilik media. Pemilik media yang selalu menjadi direktur utama dalam perusahaan media massa menjadi jalan utama bagi pemilik media tersebut untuk menentukan arah pemberitaan media yang dipimpinnya. Adanya perbedaan pada pemberitaan tentang Deklarasi SBY Boediono dikarenakan kepemilikan media.

Pemilik Media Indonesia *online* adalah Surya Paloh yang menjabat sebagai direktur utama dan mempunyai hak untuk menunjuk pimpinan redaksi sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pemberitaan yang dikeluarkan sehari-hari. Surya Paloh juga berhak menentukan isi berita yang diinginkan serta mengubahnya. (Keller, 2009:43-44). Surya Paloh selalu mengkritisi pemerintah apabila sistem yang berjalan tidak adil. Surya Paloh melihat bahwa media berperan sebagai alat kontrol pemerintah apabila dalam pelaksanaannya menyimpang dan merugikan banyak pihak, harus di ingatkan (Keller 2009: 46).

Pemberitaan Media Indonesia *online* mengenai pemerintah disini khususnya Capres dan Cawapres SBY-Boediono memang memberitakan dengan nada negatif, karena Surya Paloh selalu mengkritisi pemerintah apabila sistem yang dijalankan merugikan banyak pihak. Khususnya berkaitan dengan pemilihan Boediono sebagai Cawapres SBY dianggap dapat memperburuk sistem perekonomian bangsa dengan sistem perekonomian Internasional yang dianutnya sehingga dapat merugikan Bangsa Indonesia.

Pemilik media berhak untuk melakukan intervensi dalam pemberitaan di media yang di pimpinnya, Sehingga hal ini berpengaruh dalam pemberitaan Deklarasi SBY-Boediono mengenai pemilihan Boediono. Oleh sebab itu Media Indonesia *online* menonjolkan pemberitaan yang negatif karena Surya Paloh memandang bahwa pemilihan Boediono sebagai Cawapres tidak tepat untuk masa pemerintahan mendatang dari segi Ekonomi, Politik dan Persatuan Bangsa Indonesia.

Erik Thohir Pemilik media sekaligus direktur utama Republika *online* tersebut memegang hak untuk menentukan pimpinan redaksi dan selalu melibatkan diri dalam pengambilan keputusan redaksi dan pemberitaan sehari-hari. Erik Thohir juga memiliki andil dalam menyunting artikel-artikel yang akan dimuat. Isi media yang dimuat mencerminkan kepribadian media Republika *online* yang religius salah satunya Budaya perusahaan, dimana pembaca Republika *online* yang

mayoritas muslim. Pemilik media menghindari aktivitas politik atau berita-berita politik secara berlebihan, karena ia tidak ingin terlibat dalam dunia politik yang akan berimbas pada konflik kepentingan politik terhadap media yang dipimpinnya, hanya memberitakan peristiwa-peristiwa politik yang menarik saja dalam medianya (Keller, 2009:54-55).

Sehingga wajar apabila *Republika online* memberitakan Deklarasi SBY-Boediono dengan nada positif dan cenderung menyatakan kesetujuannya terhadap pemilihan Boediono sebagai Cawapres SBY yang dianggap tepat untuk masa pemerintahan mendatang dilihat dari segi ekonomi, politik dan untuk kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Selain itu pemilik media *Republika online* yang hanya menampilkan peristiwa politik yang menarik saja maka pemberitaan Deklarasi SBY-Boediono ini merupakan peristiwa penting dan menarik dari dunia politik. Deklarasi SBY-Boediono merupakan peristiwa menarik dengan teka-teki mengenai siapa yang akan dipilih SBY untuk mendampingi sebagai Cawapres di dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Juli 2009.

Melalui keterangan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa media massa sebagai media yang berperan dalam penyaluran informasi kepada khalayak memiliki perbedaan-perbedaan dalam mengemas suatu realitas menjadi sebuah berita yang disajikan kepada pembaca. Perbedaan-perbedaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang peneliti ketahui dari penelitian lapangan dan referensi mengenai analisis *framing*

khususnya pada Media Indonesia *online* dan Republika *online*. Faktor-faktor seperti ideologi media, sistem kepemilikan yang dapat mempengaruhi proses produksi berita dalam menentukan pemberitaan sesuai dengan arah pemberitaan yang di inginkan oleh masing media.